

**PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PERTAMBANGAN TANPA
IZIN OLEH KEPOLISIAN RESORT PULAU BURU**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh Gelar
Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum



Oleh

YULIA NABILA ALMAULIDI

145010107111051

**KEMENTRIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA FAKULTAS HUKUM MALANG**

2018

HALAMAN PENGESAHAN

**PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PERTAMBANGAN TANPA
IZIN OLEH KEPOLISIAN RESORT PULAU BURU**

Oleh :

**Yulia Nabila Almaulidi
145010107111051**

Skripsi ini telah disahkan pada tanggal :
Pembimbing Utama,

Pembimbing Kedua,

Dr. Bambang Sugiri, SH.M.Hum
NIP. 195707171984031002

Eny Harjati, SH, MH
NIP. 195904061986012001

Ketua Bagian Hukum Pidana

Dr. Yuliati, SH, L.LM
NIP. 196607101992032003

Mengetahui, Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Dr. Rachmad Safa'at, SH, M.Si NIP.
196208051988021001

IDENTITAS PENGUJI

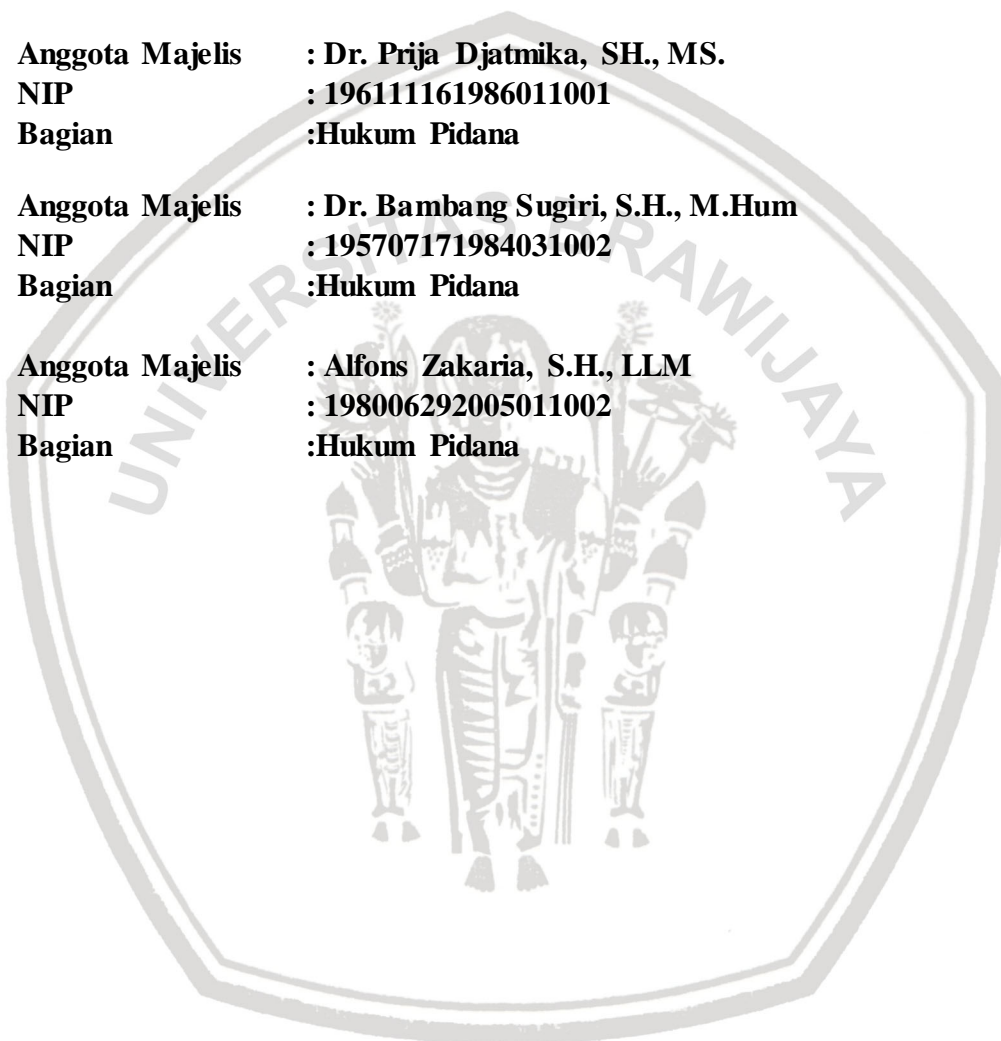
Ketua Majelis : Prof. Dr. I Nyoman Nurjaya, S.H., M.S
NIP : 195409251980031002
Bagian : Hukum Pidana

Sekretaris Majelis : Mufatikhatul Farikhah, S.H., M.H
NIP : 198408162015042002
Bagian : Hukum Pidana

Anggota Majelis : Dr. Prija Djatmika, SH., MS.
NIP : 196111161986011001
Bagian : Hukum Pidana

Anggota Majelis : Dr. Bambang Sugiri, S.H., M.Hum
NIP : 195707171984031002
Bagian : Hukum Pidana

Anggota Majelis : Alfons Zakaria, S.H., LLM
NIP : 198006292005011002
Bagian : Hukum Pidana

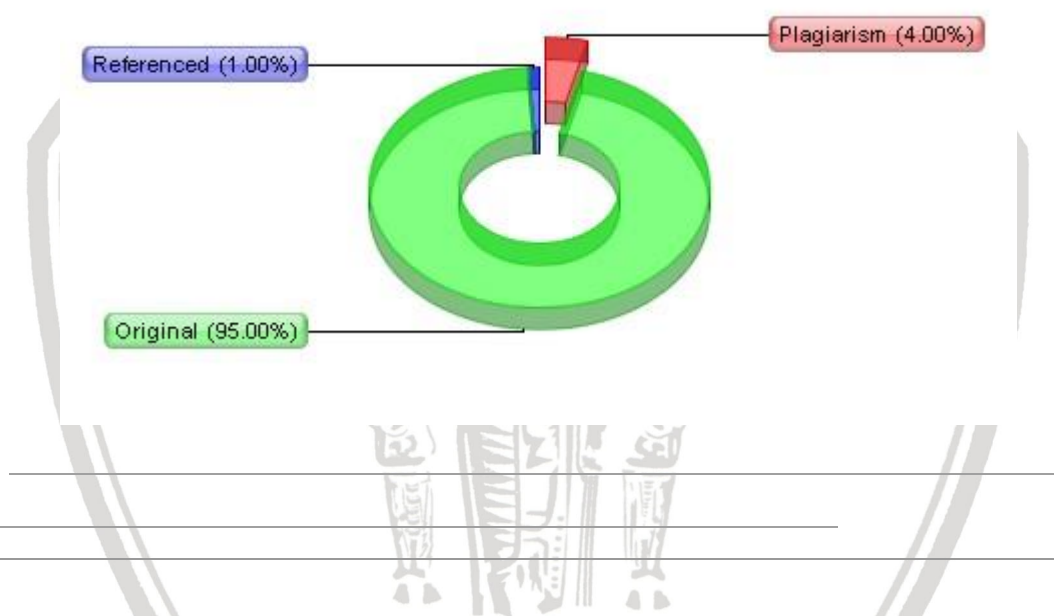


Plagiarism Detector v. 1092 - Originality Report:

Analyzed document: 23/05/2018 11:17:09

"YULIA NABILA ALMAULIDI-
145010107111051-
SKRIPSII(1).rtf"

Licensed to: Law Faculty Brawijaya University



% 4 wrds:
593

<http://docplayer.info/66071274-Standart-operation-procedure-sop.html>

% 4 wrds:
690

<http://ririnpuspitasarifr.blogspot.co.id/2014/10/pasal-yang-memuat-sanksi-pidana-dan.html>

% 3 wrds:
384

<https://core.ac.uk/display/74019775>

[Show other Sources:]

Relation chart:



Wikipedia:	Google Books:	Ghostwriting services:	Anti-cheating:
Wiki Detected!	[not detected]	[not detected]	[not detected]

Excluded Urls:

Included Urls:

Detailed document analysis:

Distribution graph:

Comparison Preset: Word-to-Word. Detected language:

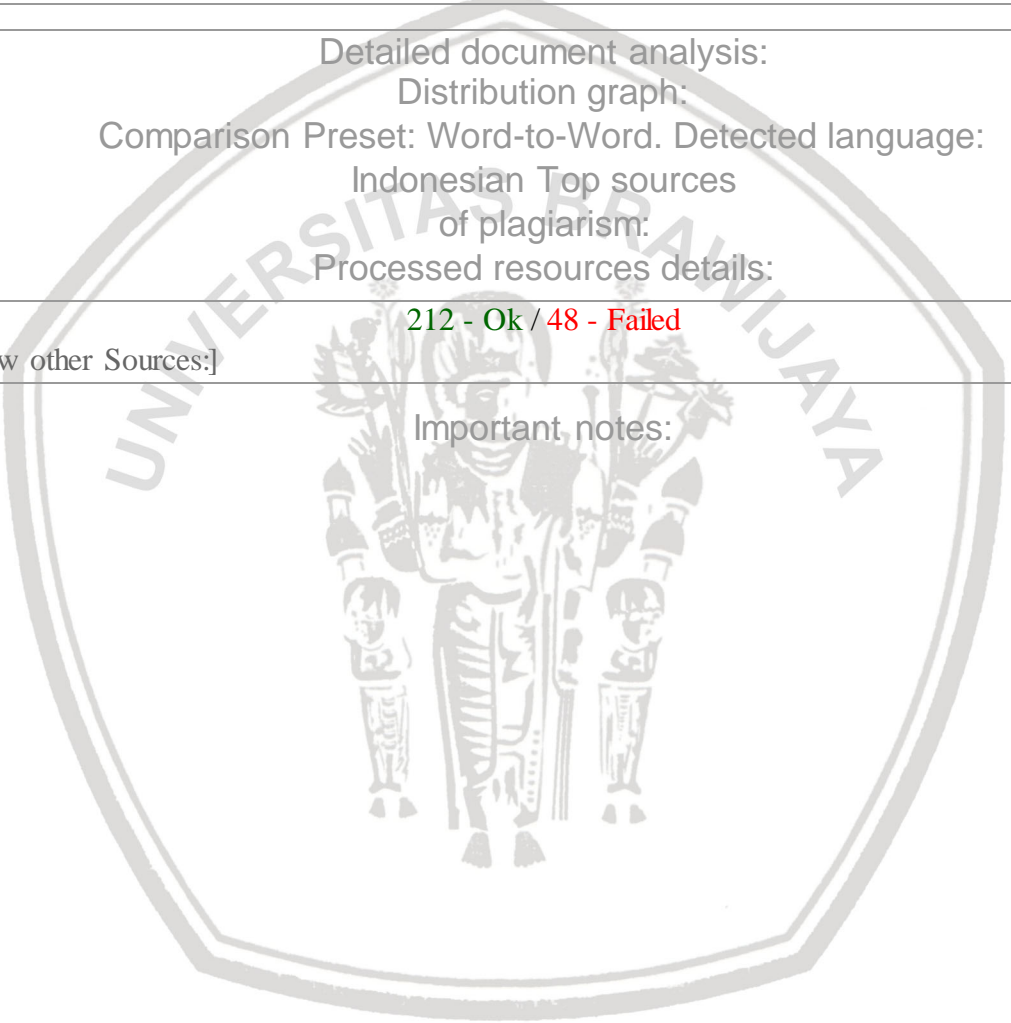
Indonesian Top sources
of plagiarism:

Processed resources details:

212 - Ok / 48 - Failed

[Show other Sources:]

Important notes:



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : Yulia Nabila Almaulidi
2. Jenis Kelamin : Perempuan
3. Tempat Tanggal Lahir: Ambon, 28 Juli 1997
4. Status : Belum Kawin
5. Alamat : Jl. Terusan Cikampek Nomor 24, Malang
6. Kewarganegaraan : Indonesia
7. Agama : Islam
8. Nomor Handphone : 082198565907
9. Email : yulianabila28@gmail.com

Pendidikan :

1. SD Alhilaal 1 Namlea, Maluku 2002 - 2008
2. SMP Negeri 1 Namlea, Maluku 2008 - 2011
3. SMA Negeri 1 Namlea, Maluku 2011 – 2014
4. Universitas Brawijaya Malang (Fakultas Hukum) 2014 - 2018

Hormat saya

Yulia Nabila Almaulidi

KATA PENGANTAR

Segala puji hanya bagi Allah SWT yang telah memberikan petunjuk, karunia, dan hidayah-Nya yang berlimpah kepada hambanya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul **“Penegakan Hukum Tindak Pidana Pertambangan Tanpa Izin oleh Kepolisian Resort Pulau Buru”**.

Ketertarikan penulis akan topik ini didasari oleh maraknya penambang emas yang melakukan pertambangan secara ilegal di Indonesia, khususnya di daerah Kabupaten Buru Maluku (Pulau Buru). Selain itu, telah terjadi kerusakan lingkungan yang berdampak pada kelangsungan hidup masyarakat. Untuk itu penulis merasa perlu dilakukan penelitian terhadap permasalahan pertambangan ilegal tersebut, yang berkaitan dengan penegakan hukumnya.

Tugas Akhir ini dapat diselesaikan dengan bantuan dan kerjasama dari berbagai pihak, dengan segala kerendahan hati dan rasa hormat peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Rachmad Safa'at, SH., M.Si, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
2. Ibu Yuliati, SH., LL.M selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Pidana di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
3. Bapak Dr. Bambang Sugiri, SH.M.Hum., selaku pembimbing utama, atas bimbingan dan kesabarannya.
4. Ibu Eny Harjati, SH.MH., sebagai pembimbing kedua yang telah memberikan bantuan bimbingan dan kesabarannya.

5. Bapak AKP. M. Ryan Citra Yudha, S.I.K, selaku Kasat Reskrim Polres Pulau Buru, Bapak AIPTU Syarifudin selaku Kanit Tindak Pidana Tertentu.
6. Bapak Brigpol I Made Maghat Sanjaya dan Bapak Briпка Kamarudin Sangadji selaku anggota penyidik di Unit Pidana Tertentu serta Pegawai Negeri Sipil Polri yang ikut serta membantu kelancaran penelitian.
7. Ibu Ir. June Pattikawa selaku Kepala Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara Provinsi Maluku yang telah memberikan ilmu terkait dengan masalah dalam penelitian.
8. Ucapan terimakasih untuk keluarga, sahabat, teman serta pihak-pihak yang turut membantu selesainya skripsi ini, yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Penulis menyadari atas segala keterbatasan dalam penyusunan tugas akhir ini. Dengan kerendahan hati penulis menerima segala kritik dan saran yang membangun dari pembaca agar penulis dapat memperbaiki penulisan tugas akhir. Penulis berharap semoga tugas akhir ini ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu hukum di Indonesia.

Malang, Mei 2018

Penulis

**PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PERTAMBANGAN TANPA
IZIN OLEH KEPOLISIAN RESORT PULAU BURU**

**Yulia Nabila Almaulidi, Dr. Bambang Sugiri, SH.M.Hum., Eny Harjati,
SH.MH.**

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Email : yulianabila28@gmail.com

Abstrak

Setiap daerah memiliki potensinya masing-masing. Kabupaten Buru yang berada di Provinsi Maluku (Pulau Buru) merupakan salah satu Kabupaten yang memiliki potensi pertambangan emas yang cukup besar dengan kualitas yang baik, namun belum bisa dimanfaatkan secara maksimal. Yang menjadi masalah di sini yaitu ketika penambangan yang dilakukan adalah penambangan yang tanpa izin atau pun dengan izin “menyuap” kepada pejabat terkait. Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap tindak pidana tanpa izin (*illegal mining*) ini wajib dilakukan demi tercapainya supremasi hukum. Sebab, apabila dibiarkan terus-menerus, tidak menutup kemungkinan dapat mengganggu masyarakat setempat akibat dampak lingkungan yang diakibatkan oleh *illegal mining* tersebut. Tetapi, pihak Kepolisian Resort Pulau Buru menghadapi beberapa kendala pada saat melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana pertambangan batuan tanpa izin tersebut. Kata kunci : penegakan hukum, tindak pidana, pertambangan tanpa izin

Abstract

Each region in Indonesia has the own potential. Buru Island is one of region that has the potential for a sizeable gold mining with good quality, but can not be fully utilized. The legal problem here is when the mining is done is illegal mining or legal mining. Therefore, the enforcement of the law against the crime (illegal mining) must be done in order to achieve the rule of law. Because, if allowed to continue, it is possible to interfere with local residents due to the environmental impact caused by the illegal mining. However, the Police of Resort Pulau Buru face several obstacles when enforcing the law against illegal mining.

Keywords : law enforcement, criminal acts, illegal mining.



DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN.....	Error!
--------------------------	--------

Bookmark not defined.

HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
KATA PENGANTAR.....	7
DAFTAR ISI.....	11
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	x
RINGKASAN.....	xi
SUMMARY.....	xii
BAB I.....	
Error!	
Bookmark not defined.	
PENDAHULUAN.....	Error!
Bookmark not defined.	
A. Latar Belakang.....	Error!
Bookmark not defined.	
B. Rumusan Masalah.....	Error!
Bookmark not defined.	
C. Tujuan Penelitian.....	Error!
Bookmark not defined.	
D. Manfaat Penelitian.....	Error!
Bookmark not defined.	
E. Sistematika Penulisan.....	Error!
Bookmark not defined.	
BAB II.....	Error!
Bookmark not defined.	
TINJAUAN PUSTAKA.....	Error!
Bookmark not defined.	
A. Tinjauan Umum Penegakan Hukum.....	Error!
Bookmark not defined.	
B. Tinjauan Umum Tindak Pidana.....	Error!
Bookmark not defined.	
C. Tinjauan Umum Kepolisian.....	Error!
Bookmark not defined.	
D. Tinjauan Umum Pertambangan.....	Error!
Bookmark not defined.	
BAB III.....	Error!
Bookmark not defined.	
METODE PENELITIAN.....	Error!
Bookmark not defined.	
A. Jenis Penelitian.....	Error!
Bookmark not defined.	
B. Pendekatan Penelitian.....	Error!
Bookmark not defined.	
C. Alasan Pemilihan Lokasi.....	Error!
Bookmark not defined.	

D. Jenis dan Sumber Data.....	Error!
Bookmark not defined.	
E. Teknik Pengumpulan Data.....	Error!
Bookmark not defined.	
F. Populasi, Sampling dan Responden.....	Error!
Bookmark not defined.	
G. Teknik Analisis Data.....	Error!
Bookmark not defined.	
H. Definisi Operasional.....	Error!
Bookmark not defined.	
BAB IV.....	Error!
Bookmark not defined.	
HASIL DAN PEMBAHASAN.....	Error!
Bookmark not defined.	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	Error!
Bookmark not defined.	
1. Gambaran Umum Kabupaten Buru (Pulau Buru)	Error!
Bookmark not defined.	
2. Gambaran Umum Kepolisian Resort Pulau Buru.....	Error!
Bookmark not defined.	
3. Gambaran Umum Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Maluku.....	Error!
Bookmark not defined.	
4. Dasar Hukum Pertambangan di Pulau Buru.....	Error!
Bookmark not defined.	
B. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pertambangan Tanpa Izin di Kepolisian Resort Pulau Buru.....	Error!
Bookmark not defined.	
C. Kendala Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pertambangan Tanpa Izin di Kepolisian Resort Pulau Buru Maluku serta Upaya untuk Mengatasinya.	
Error! Bookmark not defined.	
1. Kendala penegakan hukum tindak pidana pertambangan tanpa izin.....	Error!
Bookmark not defined.	
2. Upaya terhadap kendala penegakan hukum tindak pidana pertambangan tanpa izin.....	Error!
Bookmark not defined.	
BAB V.....	Error!
Bookmark not defined.	
PENUTUP.....	Error!
Bookmark not defined.	
A. Kesimpulan.....	Error!
Bookmark not defined.	
B. Saran.....	Error!
Bookmark not defined.	
DAFTAR	

PUSTAKA..... Error!
Bookmark not defined.



DAFTAR TABEL

Tabel. Penelitian Sebelumnya.....	7
Tabel 4.1 Jumlah Kasus Pertambangan.....	68

DAFTAR GAMBAR

Bagan 4.1 Struktur Organisasi Kepolisian Resort Pulau Buru	40
Bagan 4.2 Struktur Organisasi Sat Reskrim Polres Pulau Buru.....	44

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Keterangan Hasil Penelitian di Kepolisian Resort Pulau Buru	95
Lampiran 2. Surat Keterangan Hasil Penelitian di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Maluku.....	96
Lampiran 3. Dokumentasi Aktivitas Pertambangan Ilegal di Gunung Botak Pulau Buru	97

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pertumbuhan industri menjadi salah satu usaha bagi negara untuk dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Pertumbuhan ini diikuti dengan pemanfaatan sumberdaya alam untuk memenuhi kebutuhan bersama¹. Pertambangan mineral dan batubara merupakan sektor sumber daya alam yang sangat berpengaruh bagi pertumbuhan suatu bangsa². Bagaimana tidak, hasil tambang yang sangat bernilai dalam perekonomian baik mineral maupun batubara dioperasi-produksikan oleh suatu perusahaan pemegang izin atau kontrak dengan tujuan mencapai keuntungan bagi perusahaan tersebut, kemudian di sisi lain negara tempat lokasi pertambangan tersebut mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.

Pertambangan mineral dan batubara merupakan salah satu sumber daya alam yang dikuasai oleh negara, sebagaimana tertulis dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yaitu “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.” Pasal ini adalah dasar dari Konsep Hak Penguasaan Negara³, dimana hak tersebut mencakup wewenang untuk mengatur,

¹ Nurlaila, **Dampak Aktivitas Pertambangan Terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Tepian Hutan**, Institut Pertanian Bogor, Bogor, 2014, hlm.1

² Ahmad Redi, **Hukum Penyelesaian Sengketa Pertambangan Mineral dan Batubara**. Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm.23

³ Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 001-021-022/PUU-I/2003 dengan memberikan tafsir atas frasa “dikuasai oleh negara” dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: dikuasai oleh negara haruslah diartikan mencakup makna penguasaan oleh negara dalam arti luas yang bersumber dari konsepsi kedaulatan rakyat Indonesia atas segala

mengurus, dan mengawasi pengelolaan atau penguasaan sumber daya alam, dalam hal ini termasuk tambang⁴.

Bentuk dari pengaturan serta pengawasan pengelolaan tambang oleh pemerintah yakni dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara⁵. Undang-Undang ini merupakan ketentuan yang menggantikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 pada dasarnya mengatur tentang pengelolaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara. Tujuan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara mengandung unsur kepentingan yang terkait langsung dengan usaha pertambangan, yaitu kepentingan pertumbuhan ekonomi (*economic development*), keadilan sosial (*social equity/social justice*), dan lingkungan hidup (*environmental protection*)⁶. Ketiga aspek tersebut menjadi satu kesatuan yang terkonvergensi secara utuh dalam kebijakan dan pelaksanaan pengelolaan sumber daya alam mineral dan batubara yang menjadi pertimbangan bahwa bahan galian atau mineral dan batubara yang terkandung dalam wilayah

sumber kekayaan “bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya”. Termasuk pula di dalamnya pengertian kepemilikan publik dan kolektivitas rakyat atas sumber-sumber kekayaan dimaksud. Dalam arti rakyat dikonstruksikan oleh UUDNREI 1945 memberikan mandate kepada negara untuk mengadakan kebijakan dan tindakan pengurusan, pengaturan, pengelolaan, dan pengawasan untuk tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

⁴ Pan Mohamad Faiz, “Penafsiran Konsep Penguasaan Negara Berdasarkan Pasal 33 UUD 1945 dan Putusan Mahkamah Konstitusi”, <http://dosen.narotama.ac.id/wp-content/uploads/2011/04/PENAFSIRAN-KONSEP-PENGUASAAN-NEGARA.pdf>, WebBlog Dosen Universitas Narotama Surabaya, diakses tanggal 4 Desember 2017.

⁵ H. Salim HS, **Hukum Pertambangan di Indonesia**, Raja Grafindo, Jakarta, 2010, hlm. 25

⁶ H. Salim HS, **Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara**, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 124

hukum Indonesia merupakan kekayaan alam yang tidak dapat diperbaharui mempunyai peranan penting dalam memenuhi hajat orang banyak.

Negara sebagai pemegang hak menguasai atas pertambangan mineral dan batubara memberikan kewenangan kepada pemerintah melalui pemberian ontrol izin, lisensi, dan konsensi. Kewenangan perizinan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 terbagi atas kewenangan yang didasarkan pada pendekatan wilayah ontrolive⁷, yaitu pemerintah pusat dengan izin oleh Menteri Sumber Daya Mineral meliputi kewenangan yang lokasi, manfaat, serta dampaknya lintas provinsi, pemerintah provinsi dengan izin gubernur berada di lintas kabupaten/kota, serta pemerintah kabupaten/kota dengan izin bupati/walikota berada dalam satu kabupaten/kota.

Melalui pemberian izin berdasarkan kewenangan di atas, orang-perseorangan, badan usaha, dan koperasi⁸ dapat melakukan kegiatan usaha pertambangan sesuai dengan izin usaha yang disetujui oleh pejabat yang berwenang. Tanpa izin tersebut semua kegiatan pertambangan dianggap ilegal (pertambangan tanpa izin atau disingkat PETI) dan melanggar ketentuan pidana. Ketentuan pidana mengenai PETI diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang mengatur bahwa:

“Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”.

⁷ Ahmad Redi, *op.cit*, hlm. 127

⁸ Berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, pihak yang dapat mengajukan izin usaha yakni perorangan, badan usaha, dan koperasi

Dijelaskan bahwa setiap orang yang melakukan usaha tanpa memiliki izin sesuai dengan yang diatur dalam perundang-undangan maka akan dikenakan sanksi yang telah disebutkan di dalam pasal tersebut. Adapun izin tersebut yaitu IUP atau Izin Usaha Pertambangan, IPR atau Izin Pertambangan Rakyat, dan IUPK atau Izin Usaha Pertambangan Khusus.

Dalam bunyi Pasal 158 telah ditentukan 5 (lima) pasal yang dilanggar oleh orang yang melakukan usaha pertambangan tanpa izin. Uraian kelima pasal tersebut, yaitu:

- a. Pasal 37 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, mengatur tentang kewenangan pejabat dalam pemberian IUP (Izin Usaha Pertambangan).
- b. Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, mengatur tentang kewajiban pemegang IUP yang akan mengusahakan mineral lain, selain yang telah ditentukan IUPnya.
- c. Pasal 48 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, tentang IUP Operasi Produksi.
- d. Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, mengatur tentang kewenangan dari bupati/walikota dalam pemberian IPR (Izin Pertambangan Rakyat) kepada penduduk setempat.
- e. Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, tentang kewenangan Menteri dalam memberikan IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus) atau pemegang izinnya yang menyatakan tidak berminat untuk mengusahakan mineral lain yang ditemukan tersebut.

Kelima ketentuan di atas merupakan ketentuan yang mengatur kewenangan dari pejabat, baik bupati/walikota, gubernur atau menteri dalam pemberian izin

usaha pertambangan. Namun tidak jarang masyarakat mengabaikan ketentuan-ketentuan tersebut yang berakibat munculnya berbagai dampak terhadap masyarakat.

Masalah lingkungan hidup pada pertambangan dalam kenyataannya di Indonesia banyak dipersoalkan, terutama karena timbulnya dampak negatif dalam pengusahaan bahan galian sebagai akibat dari usaha pertambangan terutama PETI berupa, rusaknya hutan, tercemarnya laut, terjangkitnya penyakit, serta terjadinya konflik masyarakat pada lingkaran tambang⁹. Berdasarkan data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) bahwa sesuai verifikasi pada 2015 tercatat 302 (tiga ratus dua) lokasi PETI¹⁰ dan kasus yang terjadi misalnya pada tanggal 28 Januari 2016 sebanyak 26 (dua puluh enam) orang yang bekerja di tambang galian C di Kecamatan Patumbak, Deliserdang, Sumatera Utara, ditangkap aparat Kepolisian Resor Medan karena di lokasi penambangan galian C diduga tidak memiliki izin pertambangan. Begitu juga dengan dugaan PETI di Bogor, Jawa Barat oleh Kepolisian Resor Bogor yang menangkap 22 (dua puluh dua) penambang emas liar yang beroperasi di wilayah penambangan milik PT Aneka Tambang (Persero) Tbk, Gunung Pongkor¹¹. Selain kasus tersebut masih banyak kasus PETI yang terjadi salah satunya yaitu kasus tambang emas di Gunung Botak Kabupaten Buru, Maluku.

Kabupaten Buru atau yang disebut Pulau Buru adalah wilayah timur Indonesia yang memiliki kekayaan alam berlimpah salah satunya yaitu tambang

⁹ Fenty U. Puluhulawa, **Pengawasan Sebagai Instrumen Penegakan Hukum Pada Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara**, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 11 No. 2 Mei 2011, hlm. 296

¹⁰ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, <http://www.menlh.go.id/deklarasi-pengendalian-pencemaran-dan-kerusakan-lingkungan-akibat-pertambangan/>, diakses pada 7 Desember 2017

¹¹ Ahmad Redi, *op.cit*, hlm.129

emas yang ditemukan di Gunung Botak Kecamatan Teluk Kaiely. Kegiatan pertambangan emas yang terdapat di Gunung Botak telah ada sejak tahun 2011. Pasca meningkatnya aktivitas penambangan emas skala kecil di Gunung Botak setidaknya telah memberikan dampak meningkatnya perekonomian masyarakat sekitar dan juga masyarakat dari berbagai daerah di Indonesia yang mencoba menjadi penambang di Gunung Botak.

Data dari Reskrim Polres Pulau Buru menyatakan bahwa sejak ditemukan kandungan emas di Pulau Buru pada tahun 2011 hingga sampai dengan tahun 2017, tercatat baru 22 (dua puluh dua) kasus yang ditangani oleh Kepolisian Resort Pulau Buru. Sementara jumlah penambang ilegal sejak dibukanya area tambang di Gunung Botak sampai dengan 2015 mencapai 50.000 jiwa. Jumlah ini kemudian berkurang menjadi ± 17.000 jiwa setelah adanya penertiban area tambang. Kemudian hingga 2017 masih bertahan ± 13.000 PETI di area tambang tersebut.¹² Jika dilihat, kasus yang diproses tentu tidak sebanding dengan ribuan penambang yang melakukan penambangan tanpa mengantongi izin di wilayah pertambangan tersebut. Akibat dari pertambangan tersebut yakni kondisi lingkungan hidup di sekitar wilayah pertambangan mulai tercemar, dari sumber air bersihnya sampai berdampak pada perikanan dan lahan pertaniannya.

Terdapatnya sumber daya emas di Gunung Botak telah memunculkan banyaknya masyarakat yang mencari peruntungan dengan menjadi penambang emas. Penambangan emas yang terdapat di Gunung Botak dilakukan secara ilegal karena penambang tidak memiliki izin pertambangan rakyat sebagaimana

¹² Data hasil pra survey yang diperoleh peneliti dari Kepolisian Resort Pulau Buru, pada tanggal 5 Desember 2017.

diwajibkan oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Terjadi benturan antara fakta yuridis dan empiris. Penegakan hukum terhadap tindak pidana tanpa izin (*illegal mining*) ini wajib dilakukan demi keadilan sosial bagi masyarakat dan pihak kepolisian sebagai aparat penegak hukum memiliki peranan penting untuk mengatasi PETI ini. Sebab, apabila dibiarkan terus-menerus, tidak menutup kemungkinan dapat mengganggu masyarakat setempat akibat dampak lingkungan yang diakibatkan oleh pertambangan tanpa izin. Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **Penegakan Hukum Tindak Pidana Pertambangan Tanpa Izin Oleh Kepolisian Di Kabupaten Buru Maluku**. Berikut deskripsi penelitian sebelumnya untuk menjaga kemutakhiran dan orisinalitas, sebagaimana tabel dibawah ini :

Tahun Penelitian	Nama Peneliti dan Asal Instansi	Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Keterangan
2016	Elly Wahyuni Universitas Brawijaya	Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Penambang Pasir Tanpa Izin (<i>Illegal</i>) di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Kota Kediri (Studi di Kepolisian Resort Kota Kediri)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimanakah proses penyidikan terkait dengan tindak pidana penambangan pasir <i>illegal</i> di wilayah hukum Kepolisian Resort Kediri? 2. Bagaimana dakwaan yang digunakan polisi dalam BAP dalam kasus penambangan pasir <i>illegal</i> di wilayah hukum Kepolisian 	Perbedaan dari penelitian penulis dengan skripsi pertama yaitu dilihat dari objek tambangannya yang merupakan tambang pasir ilegal, sementara objek tambang penulis merupakan tambang emas yang memiliki nilai jual berbeda. Kemudian lokasi penelitian skripsi pertama berada di Kota Kediri, sementara lokasi

			Resort Kota Kediri?	penelitian penulis berada di Kabupaten Buru Maluku. Selanjutnya variabel pada skripsi pertama lebih spesifik menganal dakwaan yang akan diberikan oleh pihak Kepolisian terhadap penambang ilegal.
2014	Sabrina Helwati Universitas Brawijaya	Kendala Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pertambangan Batuan Tanpa Izin Oleh Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia (Studi di Kepolisian Resort Mojokerto)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apa kendala penegakan hukum yang dihadapi oleh Kepolisian Resort Mojokerto terhadap tindak pidana pertambangan batuan tanpa izin ? 2. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Resort Mojokerto untuk mengatasi kendala penegakan hukum terhadap tindak pidana pertambangan batuan tanpa izin ? 	Tidak jauh berbeda dengan skripsi pertama, skripsi kedua juga memiliki perbedaan dengan penelitian penulis pada objek tambang yang merupakan tambang pasir dan lokasi penelitian skripsi kedua berada di wilayah Kepolisian Resort Mojokerto. Variabel penelitian skripsi pertama hampir serupa dengan penelitian penulis, namun yang membedakannya adalah substansi yang akan dituangkan dalam pembahasan, karena kendala yang penegakan yang dihadapi oleh Kepolisian

				Resort Mojokerto tentu tidak sama dengan kendala yang dihadapi oleh Kepolisian Resort Pulau Buru yang merupakan lokasi penelitian penulis.
--	--	--	--	--

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan di atas, permasalahan yang hendak diangkat dalam penulisan ini adalah:

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana pertambangan tanpa izin di Kepolisian Resort Pulau Buru?
2. Apa yang menjadi kendala penegakan hukum terhadap tindak pidana pertambangan tanpa izin serta bagaimana upaya untuk mengatasinya di Kepolisian Resort Pulau Buru?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini diambil berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan, yaitu:

1. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap tindak pidana pertambangan tanpa izin di Kepolisian Resort Pulau Buru
2. Untuk mengetahui kendala penegakan hukum terhadap tindak pidana pertambangan tanpa izin serta upaya untuk mengatasinya di Kepolisian Resort Pualu Buru.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Memberi sumbangan pemikiran berupa khasanah keilmuan dalam bidang hukum, khususnya hukum pidana;
- b. Menambah referensi hukum yang dapat digunakan sebagai acuan bagi penelitian dalam bidang yang relevan dengan penelitian ini dimasa mendatang dalam lingkup yang lebih detail, mendalam dan jelas.

2. Manfaat Praktis

- a. Penulis berharap bahwa hasil penelitian ini dapat menjadi acuan sekaligus evaluasi bagi penegak hukum agar dapat lebih maksimal dalam melakukan penegakan hukum terutama terhadap pertambangan tanpa izin sehingga dapat membawa kemajuan bagi perlindungan hukum dan aset Sumber Daya Alam Indonesia dapat lebih terlindungi lagi.
- b. Guna menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis tentang penegakan hukum terhadap tindak pidana pertambangan tanpa izin.

E. Sistematika Penulisan

Sub ini memberikan suatu gambaran yang jelas dan terarah tentang penyusunan proposal ini. Berikut di kemukakan sistematika dan alur pembahasan yang terbagi di dalam:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Bab ini berisikan mengenai kajian pustaka terhadap Penegakan Hukum Tindak Pidana Pertambangan Tanpa Izin oleh Kepolisian di Kabupaten Buru Maluku yang meliputi kajian pustaka tentang penegakan hukum, kajian pustakan tentang tindak pidana, dan kajian pustaka tentang pertambangan.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang cara melakukan penelitian, diawali dengan merumuskan pendekatan yang digunakan serta menganalisis hasil penelitian yang didapat. Laporan hasil penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris yang memuat : penelitian, jenis penelitian, pendekatan penelitian, jenis data, alasan pemilihan lokasi penelitian, teknik pengambilan atau pengumpulan data, populasi dan sampling, teknik analisis data, serta definisi operasional.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini diawali dengan pembahasan terkait masalah di dalam penelitian yang disertai dengan uraian pembahasan dari permasalahan yang terdiri dari dua sub bab yakni tentang penegakan hukum tindak pidana pertambangan tanpa izin serta kendala dan upaya yang dihadapi kepolisian di Kabupaten Buru Maluku.

BAB V : PENUTUP

Berisikan dua sub bab yaitu simpulan dan saran dari hasil analisis tentang suatu permasalahan yang diteliti.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Penegakan Hukum

1. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.¹ Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah/pandangan nilai yang mantap dan menegajewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Penegakan hukum dibedakan menjadi dua, yaitu:²

a. Ditinjau dari sudut subyeknya

Dalam arti luas, proses penegakkan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normative atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, penegakkan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparaturnegakan

¹ Shant Dellyana, **Konsep Penegakan Hukum**. Liberty, Yogyakarta, 1988, hlm. 32

² *Ibid*, hlm. 33

hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya.

b. Ditinjau dari sudut obyeknya, yaitu dari segi hukumnya:

Dalam arti luas, penegakkan hukum yang mencakup pada nilai-nilai keadilan yang di dalamnya terkandung bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang ada dalam bermasyarakat. Dalam arti sempit, penegakkan hukum itu hanya menyangkut penegakkan peraturan yang formal dan tertulis.

2. Teori Penegakan Hukum

Hukum di Indonesia merupakan suatu sistem yang didalamnya terdapat beberapa macam hukum yang saling berhubungan dengan saling mempengaruhi dan melengkapi untuk mencapai suatu tujuan.³ Sistem yang dimaksud tentu berpengaruh terhadap penegakan hukum. Lawrence M Friedman dalam teorinya mengartikan hukum sebagai suatu sistem yang terdiri atas:⁴

- 1) Struktur yaitu bagian-bagian dari sistem hukum yang bergerak dalam suatu mekanisme, contohnya lembaga pembuat undang-undang, pengadilan, dan berbagai bada yang diberi wewenang untuk menerapkan dan mengakkan hukum seperti polisi dan jaksa;
- 2) Substansi yaitu hasil nyata yang diterbitkan oleh sistem hukum yang berbentuk hukum *in concreto* (kaedah-kaedah hukum individual) maupun hukum *in abstrakto* (kaedah-kaedah hukum umum);

³ M. Bakri, **Pengantar Hukum Indonesia Jilid I**, UB Press, Malang, 2013, hlm. 20

⁴ *Ibid*, hlm. 20-22

- 3) Kultur atau budaya hukum yakni keseluruhan jalinan nilai sosial yang berkaitan dengan hukum serta sikap tindak yang mempengaruhi hukum.

Sedangkan Joseph Goldstein membedakan penegakan hukum pidana menjadi 3 bagian yaitu:⁵

- 1) *Total enforcement*, yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif (*substantive law of crime*). Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturan-aturan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan. Disamping itu mungkin terjadi hukum pidana substantif sendiri memberikan batasan-batasan. Misalnya dibutuhkan aduan terlebih dahulu sebagai syarat penuntutan pada delik-delik aduan (*klacht delicten*). Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut sebagai *area of no enforcement*.
- 2) *Full enforcement*, setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi *area of no enforcement* dalam penegakan hukum ini para penegak hukum diharapkan melakukan penegakan hukum secara maksimal.
- 3) *Actual enforcement*, menurut Joseph Goldstein *full enforcement* ini dianggap *not a realistic expectation*, sebab adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana dan sebagainya, yang kesemuanya mengakibatkan keharusan

⁵ *Ibid*, hlm. 39

dilakukannya *discretion* dan sisanya inilah yang disebut dengan *actual enforcement*.

B. Tinjauan Umum Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari Bahasa Belanda, yakni *strafbaarfeit*.

Pengertian dan unsur yang diuraikan di atas merupakan pengertian dan unsur hukum pidana. Sedangkan tindak pidana merupakan perbuatan yang menyebabkan timbulnya suatu hukum pidana tersebut. Menurut Pompe, pengertian *strafbaarfeit* dibedakan menjadi :⁶

- a. Defenisi menurut teori memberikan pengertian "*strafbaarfeit*" adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum ;
- b. Definisi menurut hukum positif, merumuskan pengertian "*strafbaarfeit*" adalah suatu kejadian (*feit*) yang oleh peraturan perundangundangan dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.

Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan

⁶ Dasar-dasar Hukum Pidana, <http://usupress.usu.ac.id/files/DASAR-DASAR%20HUKUM%20PIDANA%20FINAL%20bab%201.pdf> diakses pada 9 Desember 2017

perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan⁷

Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, di mana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.⁸

2. Teori Pemidanaan

Pemidanaan bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan “pemidanaan” diartikan sebagai penghukuman.

Menurut Adami Chazawi teori pempidanaan dapat dikelompokkan dalam tiga golongan besar, yaitu⁹:

1) Teori absolut atau teori pembalasan (*vergeldings theorien*)

Aliran ini menganggap sebagai dasar dari hukum pidana adalah alam pikiran untuk pembalasan (*vergelding atau vergeltung*). Teori ini dikenal pada akhir abad 18 yang mempunyai pengikut-pengikut seperti Immanuel Kant, Hegel, Herbart, Stahl, dan Leo Polak.

2) Teori Relatif atau teori tujuan (*Doel Therien*).

Teori ini yang memberikan dasar pikiran bahwa dasar hukum dari pidana adalah terletak pada tujuan pidana itu sendiri. Oleh karena itu pidana itu

⁷Andi Hamzah. **Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana**. Ghalia Indonesia, Jakarta. 2001. hlm. 22

⁸P.A.F. Lamintang, **Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia**. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung. 1996 hlm. 16

⁹Adami Chazawi, **Pelajaran Hukum Pidana dan Stelsel Pidana**, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2002, hlm.155-156

mempunyai tujuan-tujuan tertentu, maka disamping tujuan lainnya terdapat pula tujuan pokok berupa mempertahankan ketertiban masyarakat (*de handhaving der maatshappelijkeorde*).

3) Teori Gabungan (*Verenigingstheorien*)

Teori absolut dan teori relative tentang pempidanaan, muncul teori ketiga yang disatu pihak mengakui adanya unsur pembalasan dalam hukum pidana, akan tetapi di pihak lain juga mengakui pula unsur prevensi dan unsure memperbaiki penjahat yang melekat pada tiap pidana. Teori ketika ini muncul karena terdapat kelemahan dalam teori absolut dan teori relatif.

C. Tinjauan Umum Kepolisian

Polisi berasal dari kata Yunani yaitu Politeia. Kata ini pada mulanya dipergunakan untuk menyebut “orang yang menjadi warga Negara dari kota Athena”, kemudian seiring berjalannya waktu pengertian itu berkembang luas menjadi “kota” dan dipakai untuk menyebut “semua usaha kota” dalam konteks bagian dari suatu pemerintahan.¹⁰

Polisi mengandung arti sebagai organ dan fungsi, yakni sebagai organ pemerintah dengan tugas mengawasi, jika perlu menggunakan paksaan agar yang diperintah menjalankan badan tidak melakukan larangan-larangan perintah. Menurut Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, definisi Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

¹⁰ Andi Munawarman, Sejarah Singkat POLRI, <http://www.HukumOnline.com/hg/narasi/2004/04/21/nrs,20040421-01,id.html>. diakses pada tanggal 10 Desember 2017

Pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia fungsi kepolisian diatur dalam Pasal 2 yaitu:

“Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat”.

Mengenai tugas dan wewenang polisi diatur dalam Pasal 13 dan Pasal 14

Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu :

Pasal 13

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah :

- a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. menegakan hukum; dan
- c. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 14

(1) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas:

- a. melakukan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- b. menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- c. membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- d. turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e. memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- f. melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentukbentuk pengamanan swakarsa;
- g. melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- h. menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- i. melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;

- j. melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
 - k. memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta
 - l. melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

D. Tinjauan Umum Pertambangan

1. Pengertian Pertambangan

Pertambangan yaitu suatu kegiatan yang dilakukan dengan penggalian ke dalam tanah (bumi) untuk mendapatkan sesuatu yang berupa hasil tambang.¹¹ Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009, pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batu bara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang. Pengertian tersebut dalam arti luas karena meliputi berbagai kegiatan pertambangan yang ruang lingkupnya dapat dilakukan sebelum penambangan, proses penambangan, dan sesudah proses penambangan.

Pengertian antara pertambangan mineral dan pertambangan batubara berbeda menurut undang-undang. Pertambangan mineral adalah pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan, diluar panas

¹¹ Gatot Supramono, **Hukum Pertambangan Mineral dan Batu Bara di Indonesia**, Rineka Cipta, Jakarta, 2012, hlm. 6

bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah.¹² Sedangkan yang dimaksud dengan pertambangan batubara adalah pertambangan endapan karbon yang terdapat di dalam bumi, termasuk bitumen padat, gambut, dan batuan aspal.¹³

2. Penggolongan Bahan Tambang

Dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang telah dijabarkan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, komoditas tambang terbagi menjadi beberapa golongan yaitu:

- a. Mineral radioaktif, adalah mineral yang mengandung elemen uranium dan thorium.
- b. Mineral logam, merupakan mineral yang tidak tembus pandang dan dapat menjadi penghantar panas dan arus listrik.
- c. Mineral bukan logam.
- d. Batuan dan batubara, adalah benda keras dan padat yang berasal dari bumi, yang bukan logam.

3. Wilayah Pertambangan

Wilayah pertambangan adalah wilayah yang memiliki potensi mineral dan/atau batu bara dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari tata ruang nasional.¹⁴ Dalam pengertian tersebut dikatakan wilayah pertambangan tidak terikat dengan

¹² Pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

¹³ Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

¹⁴ Pasal 1 angka 29 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

batasan administrasi pemerintahan, karena wilayah pertambangan tidak mengikuti wilayah administrasi pemerintahan (provinsi, kabupaten/kota), sehingga diperlukan koordinasi dan kerja sama antar pemerintah daerah apabila pertambangan terjadi di lintas batas pemerintahan daerah. Wilayah yang dapat ditetapkan menjadi wilayah pertambangan memiliki kriteria adanya.¹⁵

- a. Indikasi formasi batuan pembawa mineral dan/atau pembawa batubara.
- b. Potensi sumber daya bahan tambang yang berwujud padat dan/atau cair.

Wilayah pertambangan sebagai bagian dari tata ruang nasional merupakan landasan bagi penetapan kegiatan pertambangan. Untuk menetapkan wilayah pertambangan harus didasarkan atas data-data yang diperoleh di lapangan dari hasil penelitian. Oleh karena itu pemerintah dan pemerintah daerah diwajibkan untuk melakukan penyelidikan dan penelitian pertambangan dalam rangka penyiapan wilayah pertambangan. Data dan informasi hasil penyelidikan dan penelitian dituangkan ke dalam peta potensi mineral dan batubara yang dijadikan dasar penyusunan rencana wilayah pertambangan. Rencana wilayah pertambangan dituangkan dalam lembar peta dan dalam bentuk digital.¹⁶ Pasal 13 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara membagi bentuk wilayah pertambangan ke dalam 3 (tiga) bagian yang terdiri atas:

- 1) WUP (Wilayah Usaha Pertambangan)

¹⁵ Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan

¹⁶ Tri Hayati, **Era Baru Hukum Pertambangan**, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2015,, hlm. 220

WIUP merupakan wilayah yang diberikan kepada pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP). Luas dan batas WIUP ditetapkan oleh pemerintah berkoordinasi dengan pemerintah daerah berdasarkan kriteria yang dimiliki oleh pemerintah. Wilayah pertambangan dapat terdiri atas wilayah usaha pertambangan yang meliputi:

- a. WUP radioaktif;
 - b. WUP mineral logam;
 - c. WUP mineral bukan logam;
 - d. WUP batubara; dan
 - e. WUP batuan.
- 2) WPR (Wilayah Pertambangan Rakyat)

WPR adalah bagian dari wilayah pertambangan tempat dilakukan kegiatan usaha pertambangan rakyat. Kegiatan pertambangan rakyat hanya dapat dilakukan di dalam wilayah pertambangan rakyat. Kriteria untuk menetapkan WPR yaitu sebagai berikut:

- a. Mempunyai cadangan mineral sekunder yang terdapat di sungai dan/atau di antara tepi dan tepi sungai;
- b. Mempunyai cadangan primer logam atau batubara dengan kedalaman maksimal 25 (dua puluh lima) meter;
- c. Endapan teras, dataran banjir, dan endapan sungai purba;
- d. Luas maksimal wilayah pertambangan rakyat adalah 25 (dua puluh lima) hektar;
- e. Menyebutkan jenis komoditas yang akan ditambang;

- f. Merupakan wilayah atau tempat kegiatan tambang rakyat yang sudah dikerjakan sekurang-kurangnya 15 (lima belas) tahun;
- g. Tidak tumpang tindih dengan wilayah usaha pertambangan dan wilayah pencadangan negara.

3) WPN (Wilayah Pencadangan Negara)

WPN adalah bagian dari wilayah pertambangan yang dicadangkan untuk kepentingan strategis nasional. Untuk kepentingan strategis nasional dalam hubungan dengan pertambangan, pemerintah bekerja sama dengan DPR dengan memperhatikan aspirasi daerah dalam menetapkan WPN sebagai daerah yang dicadangkan untuk komoditas tertentu dan daerah konservasi dalam rangka menjaga keseimbangan ekosistem lingkungan.

WPN yang telah ditetapkan untuk komoditas tertentu dapat diusahakan dari sebagian luas wilayah dengan cara pemerintah melakukan persetujuan dengan DPR, begitupun terhadap WPN yang ditetapkan untuk konservasi ditentukan batasan waktu dilakukan dengan persetujuan dari DPR. WPN yang ditetapkan untuk komoditas tertentu maupun untuk konservasi tersebut berubah statusnya menjadi Wilayah Usaha Pertambangan Khusus (WUPK). Untuk dapat melakukan perubahan status dari WPN menjadi WUPK dilaksanakan dengan mempertimbangkan hal-hal yang ditetapkan di dalam Pasal 28 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagai berikut:

- a. Pemenuhan bahan baku industri dan energi dalam negeri;
- b. Sumber devisa negara;

- c. Kondisi wilayah didasarkan pada keterbatasan sarana dan prasarana;
- d. Berpotensi untuk dikembangkan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi;
- e. Daya dukung lingkungan; dan/atau
- f. Penggunaan teknologi tinggi dan modal investasi yang besar.

WUPK ditetapkan oleh pemerintah setelah berkoordinasi dengan pemerintahan daerah. Satu WUPK terdiri atas 1 (satu) atau beberapa IUPK yang berada pada lintas wilayah provinsi, lintas wilayah kabupaten/kota, dan/atau dalam 1 (satu) wilayah kabupaten/kota.

4. Izin Usaha Pertambangan

Pada dasarnya kegiatan tambang yang dilakukan oleh orang perseorangan, kelompok/masyarakat maupun badan usaha yang berbadan hukum, dapat diklasifikasikan menjadi 2 (dua) macam, yaitu:

- a. *Legal mining* merupakan kegiatan pertambangan yang didasarkan pada izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.
- b. *Illegal mining* merupakan kegiatan pertambangan yang dilakukan tanpa adanya izin dari pejabat yang berwenang.

Adapun izin pertambangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, yakni:

1) IPR (Izin Pertambangan Rakyat)

IPR sesuai rumusan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yaitu:

“Izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas”.

Berdasarkan pengertian tersebut unsur-unsur dalam IPR terdiri atas: a) adanya izin; b) adanya usaha pertambangan; c) wilayahnya pada pertambangan rakyat; d) luas wilayahnya terbatas; e) investasi terbatas.

2) IUP (Izin Usaha Pertambangan)

Istilah izin usaha pertambangan berasal dari bahasa Inggris yaitu *mining permit*, yang artinya izin untuk melaksanakan usaha pertambangan. Ada dua unsur yang terdapat pada IUP: a) adanya izin; dan b) usaha pertambangan. IUP mempunyai hubungan sangat erat dengan WIUP, karena sebelum IUP diberikan kepada pemohon, maka yang harus dilakukan terlebih dahulu adalah penetapan WIUP.

3) IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus)

IUPK berarti izin yang diberikan oleh penerbit izin kepada pemegang IUPK untuk melakukan usaha pertambangan di wilayah IUPK sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan dalam undang-undang.

Letak kekhususan yang terdapat dalam IUPK dilihat dari subjeknya yakni hanya Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang dapat menerbitkan IUPK dan yang mengajukan permohonan IUPK hanya diperbolehkan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan Badan Usaha Milik Swasta, kemudian objeknya hanya berupa mineral logam dan batubara, wilayahnya yakni WIUPK cukup luas, cara pemberian WIUPK meliputi prioritas dan lelang, dan jangka waktu IUPK terbilang panjang yaitu 48 tahun¹⁷.

5. Hukum Pertambangan

¹⁷ H. Salim HS, *op.cit*, hlm. 159

Hukum pertambangan merupakan seperangkat aturan yang bertujuan untuk melindungi kepentingan yang berkaitan dengan industri pertambangan dan untuk meminimalkan konflik antara perusahaan tambang dan memberikan penjelasan yang bersifat umum kepada siapa saja yang mempunyai hak-hak untuk melakukan kegiatan pertambangan. Definisi lain tentang hukum pertambangan disajikan oleh Salim HS. Ia mengemukakan bahwa hukum pertambangan adalah¹⁸ keseluruhan kaidah-kaidah hukum yang mengatur kewenangan Negara dalam pengelolaan bahan galian (tambang) setelahnya dan mengatur hubungan hukum antara Negara dengan orang dan atau badan hukum dalam pengelolaan dan pemanfaatan bahan galian (tambang).

Hukum pertambangan mineral dan batubara bersifat administratif, karena pemerintah pusat maupun daerah mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dalam proses pemberian izin¹⁹.

Hukum pertambangan dituangkan secara khusus dalam peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang mineral dan batubara di Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Undang-undang ini dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah, meliputi:

- 1) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan.
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

¹⁸ H. Salim HS, *op.cit*, hlm.8

¹⁹ H. Salim HS, *op.cit*, hlm.21

- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang.

6. Tindak Pidana Pertambangan

Dalam UU Pertambangan selain mengenal adanya tindak pidana pertambangan tanpa izin juga terdapat bermacam-macam tindak pidana lainnya, yang sebagian besar ditujukan kepada pelaku usaha pertambangan, dan hanya satu macam tindak pidana yang ditujukan kepada pejabat penerbit izin di bidang pertambangan. Tindak pidana tersebut adalah sebagai berikut:²⁰

- 1) Tindak pidana melakukan pertambangan tanpa izin, diatur dalam pasal 158 UU No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
- 2) Tindak pidana menyampaikan data laporan keterangan palsu, diatur dalam pasal 159 UU No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
- 3) Tindak pidana melakukan eksplorasi tanpa hak, diatur dalam Pasal 160 ayat (1) UU No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
- 4) Tindak pidana sebagai pemegang IUP eksplorasi tidak melakukan kegiatan operasi produksi, diatur dalam Pasal 160 ayat (2) UU No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

²⁰ Gatot Supramono, *op.cit*, hlm. 248

- 5) Tindak pidana pencucian barang tambang (mining loundering) diatur dalam Pasal 161 UU No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
- 6) Tindak pidana menghalangi kegiatan usaha pertambangan, diatur dalam Pasal 162 UU No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
- 7) Tindak pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan wewenang pejabat pemberi izin, tindak pidana ini diatur dalam Pasal 165 UU No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
- 8) Tindak pidana yang pelakunya badan hukum, diatur dalam Pasal 163 Tindak pidana yang pelakunya badan hukum
- 9) Pidana tambahan.

Sementara itu, H. Salim HS. membagi perbuatan yang tergolong tindak pidana pertambangan menjadi dua jenis, yaitu:

- 1) Jenis perbuatan pidana pertambangan yang dilakukan oleh subjek hukum orang:
 - a. melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK;
 - b. menyampaikan laporan yang tidak benar atau keterangan palsu;
 - c. melakukan eksplorasi tanpa memiliki IUP atau IUPK;
 - d. mempunyai IUP eksplorasi tetapi melakukan kegiatan operasi produksi;
 - e. menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK, atau izin;

- f. merintangi atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan;
 - g. mengeluarkan IUP, IPR, atau IUPK yang bertentangan dan menyalahgunakan kewenangannya.
- 2) Jenis perbuatan pidana pertambangan yang dilakukan oleh pengurus dan badan hukum.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris berorientasi pada data primer (hasil penelitian di lapangan). Penelitian hukum empiris yaitu melihat serta mengamati penerapan peraturan-peraturan dalam prakteknya terhadap masyarakat dengan cara memecahkan masalah penelitian dengan memeriksa data sekunder terlebih dahulu dan kemudian diikuti dengan melakukan penelitian data primer di lapangan.¹

B. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis yakni mengidentifikasikan dan mengkaji permasalahan-permasalahan yang dikemukakan, yaitu mengkaitkan hukum dengan usaha untuk mencapai tujuan-tujuan serta memenuhi kebutuhan-kebutuhan konkret dalam masyarakat.² Penelitian dengan pendekatan ini bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris atau mengkaji faktor-faktor sosial yang mempengaruhi pelaksanaan pasal-pasal tindak pidana yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara di Kabupaten Buru Maluku.

¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, **Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat**, Rajawali Pers, Jakarta, 1985, hlm. 52

² Rony Hanitijo Soemitro, **Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri**, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm 34.

C. Alasan Pemilihan Lokasi

Pulau Buru merupakan salah satu [pulau](#) besar di [Kepulauan Maluku](#). Pulau Buru menempati urutan ketiga setelah [pulau Halmahera](#) di Maluku Utara dan [pulau Seram](#) di Maluku Tengah. Pulau ini terkenal sebagai pulau pengasingan bagi para tahanan politik pada zaman pemerintahan [Orde Baru](#) Presiden [Soeharto](#).

Secara geografis lokasi penambangan emas ilegal terletak di sebuah bukit yang disebut sebagai Gunung Botak yang berada di Kecamatan Teluk Kaiely Kabupaten Buru Provinsi Maluku. Alasan penulis menentukan Gunung Botak Kabupaten Buru sebagai lokasi penelitian dikarenakan diyakini kandungan emas di Gunung Botak melimpah yang menyebabkan adanya mobilisasi penambang emas dari berbagai daerah yang datang untuk melakukan penambangan di wilayah tersebut. Manfaat ekonomi dari aktivitas tambang ilegal tersebut dengan demikian dirasakan bukan hanya oleh masyarakat Pulau Buru saja melainkan masyarakat di luar Pulau Buru. Hingga 2017 setidaknya terdapat ± 13.000 (tiga belas ribu) penambang yang masih bertahan dan bergantung pada area tambang Gunung Botak.

Selain itu pengrusakan lingkungan akibat adanya penambangan yang menggunakan bahan kimia berbahaya sudah mulai terlihat. Dampaknya bukan hanya sebatas terhadap lingkungan saja, melainkan terhadap masyarakat sekitar, terlebih Kabupaten Buru yang menjadi daerah lumbung padi Maluku dan potensi perikanan yang tinggi. Pada akhirnya masyarakat juga lah yang mendapatkan dampak buruknya.

D. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan penulis di dalam penelitian ini adalah:

1) Data primer

Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas³. Sumber data yang dimaksud dalam hal ini ialah yang berkaitan dengan penegakan hukum terhadap tindak pidana pertambangan tanpa izin serta kendalanya yang didapat dari narasumber.

2) Data sekunder

Data sekunder mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian terdahulu, dan seterusnya⁴. Data sekunder diperoleh dengan melakukan kajian pustaka sebagai data pelengkap sumber data primer berupa dokumen dari instansi terkait maupun data statistik yang diperlukan dalam penelitian ini.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data disesuaikan dengan pendekatan penelitian dengan mengumpulkan sumber data primer dan sumber data sekunder.

1) Teknik pengumpulan data primer

Teknik pengumpulan data primer yaitu dengan wawancara. Wawancara adalah situasi peran antara pribadi bertatap muka dengan mengajukan pertanyaan kepada responden oleh pewawancara yang telah dirancang untuk

³ Amiruddin, **Metode Penelitian Hukum**, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm.30

⁴ Soerjono Soekanto, *op.cit*, hlm.12

memperoleh jawaban yang relevan⁵. Wawancara dilakukan dengan membuat daftar pertanyaan-pertanyaan yang telah disusun secara sistematis, jelas, dan terarah sesuai dengan permasalahan yang diangkat.

2) Teknik pengumpulan data sekunder

Teknik pengumpulan data sekunder yaitu studi dokumentasi. Studi dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang berwujud tertulis atau gambar. Sumber tertulis atau gambar berbentuk dokumen resmi, buku, majalah, arsip, dokumen pribadi, dan foto yang terkait dengan permasalahan penelitian.⁶ Teknik bertujuan untuk memperoleh dan memahami konsep dan teori serta ketentuan yang berkaitan dengan Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara termasuk yang terdapat di internet.

F. Populasi, Sampling dan Responden

1) Populasi

Populasi yaitu keseluruhan objek, dapat berupa orang, benda, kejadian, kasus-kasus, waktu atau tempat dengan ciri atau sifat yang sama. Populasi penelitian ini adalah keseluruhan anggota kepolisian selaku penegak hukum serta Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) terkait masalah administratif.

2) Sampling

Sampling atau sampel adalah suatu prosedur dimana hanya sebagian dari populasi yang diambil dan dipergunakan untuk menentukan sifat serta ciri yang dikehendaki oleh populasi. Teknik sampling penulis gunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling* yakni dalam penentuan sampel,

⁵ Amiruddin, *op.cit*, hlm. 82

⁶ Sudarto, **Metodologi Penelitian Filsafat**, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 71

peneliti secara subyektif mengambil sampel yang dianggap *representative* bagi penelitian.⁷

Sampel dalam penelitian ini adalah polisi yang memiliki wewenang dalam menangani kasus pertambangan emas ilegal di Kabupaten Buru yaitu anggota kepolisian yang berada di Unit Tindak Pidana Tertentu yang berada di Polres Pulau Buru dan Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara yang berada di Kantor Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Maluku.

3) Responden

Responden merupakan pihak-pihak yang dijadikan sebagai sampel dalam sebuah penelitian. Responden adalah orang yang diminta untuk memberikan keterangan mengenai suatu fakta atau opini. Keterangan tersebut dapat disampaikan dalam bentuk lisan maupun tulisan. Responden dalam penelitian ini adalah 3 (tiga) penyidik yang pernah menangani perkara tindak pidana penambangan emas tanpa izin di Kabupaten Buru Maluku. Tiga penyidik tersebut antara lain:

1. AKP M. Ryan Citra Yudha, S.I.K
2. AIPTU Syarifudin
3. Brigpol I Made Maghat Sanjaya

Selain itu terdapat responden di luar Kepolisian yang memiliki wewenang yang berkaitan dengan Izin Pertambangan, yakni:

1. Ir. Martha M. Nanlohy, M.Si selaku Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Maluku

⁷ Muslan Abdurrahman, **Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum**, UMM Press, Malang, 2009, hlm.109

2. Ir. June Pattikawa selaku Kepala Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara Provinsi Maluku

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data harus sesuai dengan keabsahan data.⁸ Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik analisa data dengan cara kualitatif. Analisis kualitatif adalah analisis terhadap data yang bersifat monografis atau berwujud kasus-kasus sehingga tidak dapat disusun ke dalam suatu kategori.⁹ Metode kualitatif digunakan guna mendapatkan data yang bersifat deskriptif analitis, yaitu data yang akan diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.

H. Definisi Operasional

1. Penegakan hukum adalah usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan.
2. Tindak pidana adalah perbuatan yang menyebabkan timbulnya suatu hukum pidana bagi pelaku atau subyek hukum yang melakukannya.
3. Pertambangan adalah suatu kegiatan yang meliputi penelitian, pengelolaan, dan pengusahaan.
4. Tanpa izin adalah tidak sah atau tidak memiliki persetujuan dari pihak yang berwenang.

⁸ Andi Prastowo, **Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian**, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2012, hlm.236

⁹ Muslan Abdurrahman, *op.cit*, hlm.121

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Gambaran Umum Kabupaten Buru (Pulau Buru)

Kabupaten Buru dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat, yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000. Dengan telah disahkannya Undang Undang Nomor 32 Tahun 2008 tentang Kabupaten Buru Selatan, maka luas wilayah Kabupaten Buru telah berkurang menjadi 7.594,98 Km² yang terdiri dari luas daratan 5.577,48 Km² dan luas lautan 1.972,5 Km² serta luas perairan 57,4 Km² dengan panjang garis pantai 232,18 Km². Sedangkan berdasarkan letak astronomi, Kabupaten Buru berada pada titik koordinat 125070' – 127021' BT dan 2025' – 3055' LS.

Kabupaten Buru terdiri dari 10 kecamatan yaitu Kecamatan Namlea, Kecamatan Airbuaya, Kecamatan Waeapo, Kecamatan Waplau, Kecamatan Batabual, Kecamatan Lolong Guba, Kecamatan Waelata, Kecamatan Fena Leisela, Kecamatan Teluk Kaiely, Kecamatan Liliaiy. Secara fisiografi (makro relief), bentuk wilayah Kabupaten Buru dikelompokkan berdasarkan dataran, pantai dan perbukitan termasuk dataran tinggi (plateau/pedmont) dengan bentuk kelerengan variatif.

Jumlah penduduk Kabupaten Buru pada tahun 2011 sebesar 111.447 jiwa, dimana 56.680 jiwa berjenis kelamin laki-laki dan 54.767 jiwa adalah perempuan, dengan luas wilayah 7.595,58 km², Kabupaten Buru memiliki tingkat kepadatan

penduduk sebesar 14,67 jiwa/km². Sedangkan pada tahun 2012 sesuai data jumlah penduduk meningkat menjadi 128.870 jiwa dengan komposisi laki-laki sebanyak 67.443 jiwa dan perempuan sebanyak 61.427 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk yang mencapai 15,63 jiwa/km².

Masyarakat Buru berasal dari suku Alifuru tersebar dalam 4 (empat) wilayah hukum adat yaitu Petuanan Kaiely, Liliaiy, Tagalisa dan Leisela, tiap petuanan tersebut dipimpin oleh seorang Raja dan membawahi beberapa Soa/Marga, yang bermukim pada dataran pegunungan maupun dataran pesisir pantai Pulau Buru.

2. Gambaran Umum Kepolisian Resort Pulau Buru

Kepolisian Negara Republik Indonesia Resort Kabupaten Buru atau yang biasa disebut dengan Polres Pulau Buru yang bertempat di Jalan Pendopo Nomor 1 Namlea merupakan suatu pranata sipil yang mengatur ketertiban dan keamanan masyarakat yang berada di Pulau Buru. Polres Pulau Buru dipimpin oleh AKBP. Adityanto Budi Satrio, SH, S.I.K, MH selaku Kapolres Pulau Buru dan Kompol Ferry Mulyana Sunarya, S.IK sebagai wakilnya.

Polres Pulau Buru memiliki wilayah hukum yang luas sehingga memiliki 10 (sepuluh) Kepolisian Sektor atau disebut Polsek berdasarkan kecamatan yang berada di Kabupaten Buru. Kesepuluh Kepolisian Sektor tersebut terdiri atas Polsek Namlea, Polsek Waeapo, Polsek Waplau, Polsek Airbuaya, Polsek Batabual, Polsek Namrole, Polsek Waesama, Polsek Kapala Madan, Polsek Leksula, dan Polsek Ambalau.

Adapun visi dan misi dari Polres Pulau Buru yang selanjutnya diuraikan sebagai berikut:

Visi

Terwujudnya pelayanan kamtibmas yang unggul terjalannya kemitraan Polri dengan masyarakat, penegakan hukum yang efektif serta sinergi polisional yang proaktif dalam rangka memantapkan kamdagri diwilayah hukum Polres Pulau Buru.

Misi

1. Menyelenggarakan pelayanan kamtibmas prima melalui kegiatan pelayanan administrasi kepolisian, preemtif, preventif dan refresif (Penegakan hukum), dengan memanfaatkan kemampuan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi guna mewujudkan keamanan di wilayah hukum Polres Pulau Buru yang kondusif;
2. Melaksanakan kegiatan kemitraan dan kerja sama dengan masyarakat dan meningkatkan sinergi Polisional inter Intsansi / Lembaga serta unsur lainnya dalam rangka menciptakan situasi yang kondusif dan memelihara kamtibmas;
3. Melakukan penegakan hukum dengan tidak diskriminatif menjunjung tinggi ham anti KKN, anti kekerasan;
4. Memberikan perlindungan, pengayoman, pelayanan dan bimbingan masyarakat dengan meningkatkan peran Bhabinkamtibmas dalam mengimplementasikan strategi Polmas yang berada di Desa / Kelurahan;
5. Melaksanakan deteksi dini dan peringatan dini terhadap semua aspek kehidupan yang dapat mengganggu kamtibmas melalui kegiatan penyelidikan pengamanan dan penggalangan;

6. Menjaga keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas untuk menjamin keselamatan dan kelancaran arus orang dan barang.

Selanjutnya di bawah ini terdapat struktur organisasi Kepolisian Resort Pulau Buru yang terdiri dari unsur pimpinan, pengawas dan unsur pembantu pimpinan, unsur pelaksana, unsur pelaksana tugas pokok, unsur pendukung, dan unsur pelaksana tugas kewilayahan.





Keterangan dari bagian-bagian yang terdapat dalam struktur organisasi di atas adalah sebagai berikut:

1. Unsur Pimpinan

a. Kepala Kepolisian Resort (Kapolres) memiliki tugas untuk memimpin, mengawasi, membina dan mengendalikan satuan organisasi di lingkungan Polres dan unsur pelaksana kewilayahan dalam jajarannya; dan mengajukan pertimbangan dan saran kepada Kapolda (Kepala Kepolisian Daerah) atau Kapolwil (Kepala Kepolisian Wilayah) mengenai permasalahan yang berkaitan dengan tiap bidang-bidang tugasnya.

b. Wakil Kepala Kepolisian Resort (Wakapolres) bertugas membantu Kapolres dengan mengawasi, mengendalikan, mengkoordinasikan pelaksanaan tugas di unit organisasi Polri; dalam hak-hak mereka untuk memimpin Polres dalam kasus Kapolres berhalangan hadir di dalam menjalankan tugasnya; dan mengajukan pertimbangan dan saran kepada Kapolres perihal bidang tugasnya dan menyiapkan rencana dan program kerja Kapolres.

2. Pengawas dan Pembantu Pimpinan

a. Sie Pengawas (Siwas) bertugas untuk melaksanakan pemantauan dan pengawasan umum baik secara rutin maupun insidental untuk melaksanakan kepemimpinan kebijakan Polri di bidang pengembangan dan operasi yang dilakukan oleh unit-unit kerja, mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pencapaian kinerja dan

memberikan saran tindakan terhadap penyimpangan yang telah ditemukan.

b. Sie Profesi dan Pengamanan (Sipropam) bertugas sebagai pengamanan.

c. Sie Keuangan (Sikeu) bertugas untuk melaksanakan pelayanan fungsi yakni pembiayaan, pembuktian, pengendalian, serta akuntansi, verifikasi dan pelaporan pertanggungjawaban terhadap keuangan.

d. Sie Umum (Sium) memiliki tugas memastikan kelancaran pelayanan administrasi dan tugas-tugas kepemimpinan yang meliputi fungsi sekretaris, pengajuan umum administrasi dan pelayanan markas dalam lingkungan Polres.

e. Bagian Operasi (Bagops) mempunyai tugas untuk merencanakan serta mengendalikan administrasi operasi kepolisian, menyajikan informasi dan dokumentasi kegiatan Polres serta mengendalikan pengamanan markas, dan pengamanan kegiatan kemasyarakatan dan/atau instansi pemerintah.

f. Bagian Perencanaan Kerja (Bagren) bertugas untuk menyusun rencana kerja, mengendalikan program dan anggaran, serta menganalisa dan mengevaluasi atas pelaksanaannya, termasuk dalam hal merencanakan pengembangan satuan kewilayahan.

g. Bagian Sumber Daya (Bagsumda) mempunyai tugas untuk melaksanakan pembinaan sarana dan prasarana, bantuan dan

penerapan hukum, administrasi personil, pelatihan fungsi, dan pelayanan kesehatan.

3. Unsur Pelaksana Tugas Pokok

a. Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) memiliki tugas untuk memberikan pelayanan kepolisian secara terpadu terhadap laporan atau pengaduan masyarakat, memberikan bantuan dan pertolongan serta memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat.

b. Satuan Intelijen dan Keamanan (Sat Intelkam) bertugas menyelenggarakan atau membina fungsi Intelejen bidang keamanan, termasuk persandian, dan pemberi pelayanan dalam bentuk surat izin atau keterangan yang menyangkut orang asing, senjata api dan bahan peledak, kegiatan sosial atau Politik masyarakat dan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) kepada warga masyarakat yang membutuhkan serta melakukan pengawasan atau pengamanan dan pelaksanaannya.

c. Satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim) bertugas menyelenggarakan/membina fungsi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana secara transparan dan akuntabel dengan penerapan SP2HP, memberikan pelayanan dan perlindungan khusus terhadap korban dan pelaku anak dan wanita, menyelenggarakan fungsi identifikasi baik untuk kepentingan penyidikan maupun pelayanan umum, menyelenggarakan pembinaan, koordinasi dan pengawasan PPNS baik dibidang operasional maupun administrasi penyidikan sesuai ketentuan hukum dan per undang-undangan.

- d. Satuan Reserse Narkoba (Sat Resnarkoba) bertugas menyelenggarakan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan narkoba, termasuk penyuluhan dan pembinaan dalam rangka pencegahan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba. Sat Resnarkoba dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh KBO Narkoba yang bertanggungjawab kepada Kasat Resnarkoba.
- e. Satuan Pembinaan Masyarakat (Sat Binmas) bertugas melaksanakan pembinaan masyarakat meliputi kegiatan pemberdayaan Polmas, ketertiban masyarakat dan kegiatan koordinasi dengan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa, serta kegiatan kerja sama dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
- f. Satuan Samapta Bhayangkara (Sat Sabhara) bertugas untuk memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat, mencegah dan menangkal segala bentuk gangguan kamtibmas baik berupa kejahatan maupun pelanggaran serta gangguan keterertiban lainnya, melakukan tindakan represif tahapan awal (Repawal) terhadap semua bentuk gangguan Kamtibmas lainnya guna memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, melindungi keselamatan orang, harta benda dan masyarakat, melakukan tindakan repesif terbatas (Tipiring dan Penegakan Perda) pemberdayaan dukungan satwa dalam tugas oprasional Polri, melaksanakan SAR terbatas.

g. Satuan Lalu Lintas (Sat Lantas) adalah unsur pelaksana pada tingkat Mapolres yang bertugas memberikan bimbingan teknis atas pelaksanaan fungsi lalu lintas di lingkungan Polres serta menyelenggarakan dan melaksanakan fungsi tersebut yang bersifat terpusat pada tingkat wilayah atau antar Polsek dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas operasional pada tingkat Polres.

h. Satuan Tahanan dan Barang Bukti (Sat Tahti) bertugas menyelenggarakan perawatan tahanan meliputi pelayanan kesehatan tahanan, pembinaan tahanan serta menerima, menyimpan, dan mengamankan barang bukti beserta administrasinya di lingkungan Polres, melaporkan jumlah dan kondisi tahanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Unsur Pendukung

Seksi Teknologi Informasi Polri (Sitipol) memiliki tugas untuk menyelenggarakan pelayanan teknologi komunikasi dan informasi, meliputi kegiatan komunikasi kepolisian, pengumpulan dan pengelolaan serta penyajian data, termasuk informasi dalam hal kriminal dan pelayanan multimedia.

5. Unsur Pelaksana Tugas Kewilayahan

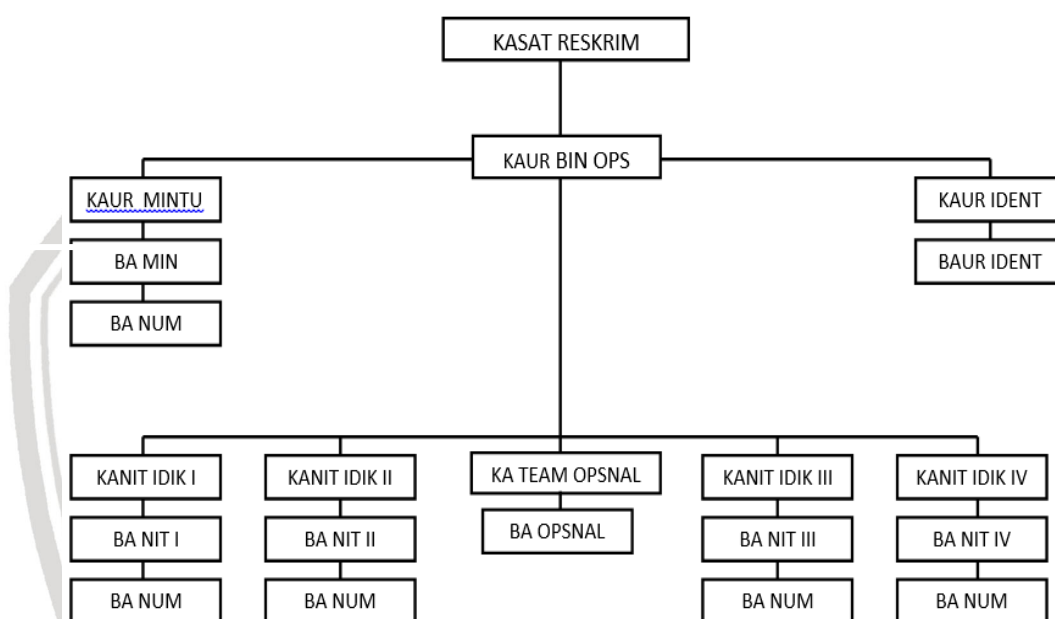
Kepolisian Sektor (Polsek) memiliki tugas untuk menyelenggarakan tugas pokok Polri dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum dan pemberian perlindungan, pengayoman serta pelaksanaan pelayanan masyarakat di wilayah

hukumnya, sesuai dengan ketentuan dalam hukum dan peraturan serta kebijakan yang berlaku dalam organisasi Polri.

Kemudian terdapat struktur organisasi dari Sat Reskrim Polres Pulau Buru selaku satuan yang menangani berbagai kejahatan tindak pidana yang terjadi di Kabupaten Buru:

Bagan 4.0

Struktur Organisasi Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resort Pulau Buru



Sumber: *Data Sekunder, diolah 2018*

Keterangan dari struktur organisasi Sat Reskrim Polres Pulau Buru diuraikan sebagai berikut:

1. Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasat Reskrim) merupakan pimpinan dari Satuan Reserse Kriminal yang bertugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi dari Sat Reskrim dalam hal ini penyelidikan, penyidikan, termasuk

fungsi identifikasi dan laboratorium forensik serta koordinasi dengan PPNS.

2. Kepala Urusan Pembinaan Operasional (Kaur Bin Ops) bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap administrasi serta pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan, menganalisis penanganan kasus dan mengevaluasi efektifitas pelaksanaan tugas Sat Reskrim.
3. Kepala Urusan Administrasi dan Ketatausahaan (Kaur Mintu) bertugas menyelenggarakan kegiatan administrasi dan ketatausahaan.
4. Kepala Urusan Identifikasi (Kaur Ident) bertugas melakukan identifikasi dan laboratorium forensik lapangan dan pengidentifikasian untuk kepentingan penyidikan dan pelayanan umum.
5. Unit terdiri dari 6 (enam) unit yang bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana umum, khusus, dan tertentu di daerah hukum Polres, serta memberikan pelayanan dan perlindungan khusus kepada remaja, anak, dan wanita baik sebagai pelaku maupun korban sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Gambaran Umum Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Maluku

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral atau disebut ESDM Provinsi Maluku dibentuk berdasarkan Perda Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Provinsi Maluku.

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral merupakan unsur pelaksana otonomi daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekertaris Daerah.

Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang energi dan sumber daya mineral berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan.

Berdasarkan susunan organisasi Dinas ESDM Provinsi Maluku, rincian komposisi Dinas ESDM Provinsi Maluku adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat
- c. Bidang Energi
- d. Bidang Pertambangan Umum
- e. Bidang Geologi dan Sumber Daya Mineral
- f. Kelompok Jabatan Fungsional

Dalam susunan organisasi dan tata kerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Maluku secara jelas digambarkan jenjang-jenjang struktural yang terdiri dari Kepala Dinas sebagai unsur pimpinan sampai kepada jenjang yang berada dibawahnya sebagai unsur pelaksana. Hal ini memperlihatkan bahwa adanya pembagian tugas yang dilaksanakan secara menyeluruh.

Disamping itu terkait pertambangan, Dinas ESDM Provinsi Maluku berwenang atas seluruh izin usaha pertambangan yang berada di wilayah Maluku baik kota maupun kabupaten. Kewenangan tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dimana tidak ada kewenangan pemberian IUP, IUPK, dan IPR oleh bupati/walikota serta atas kewenangan tersebut menjadi kewenangan gubernur yang berarti bahwa, izin hanya dikeluarkan oleh pemerintah provinsi melalui Dinas ESDM atas persetujuan gubernur.

4. Dasar Hukum Pertambangan di Pulau Buru

Dasar hukum yang mengatur tentang aktivitas pertambangan yang berlangsung di Pulau Buru adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
- b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- d. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pengesahan *Minimata Convention On Mercury* (Konvensi Minimata Mengenai Merkuri);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara;
- g. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 75/M-DAG/PER/10/2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 44/M-DAG/PER/9/2009 tentang Pengadaan, Distribusi dan Pengawasan Bahan Berbahaya;
- h. Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan (sudah tidak berlaku dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah);
- i. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 18 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara Daerah Provinsi Maluku;

- j. Keputusan Gubernur Maluku Nomor 228/2015 tentang pembentukan tim terpadu penataan Gunung Botak dan Gogorea;
- k. Keputusan Gubernur Maluku Nomor 265/2015 tanggal 20 Oktober 2015 tentang perubahan atas Keputusan Gubernur Nomor 228/2015 tentang penambahan jumlah personil tim terpadu menjadi 38 orang;
- l. Keputusan Gubernur Maluku Nomor 268/2016 tanggal 28 Juni 2016 tentang penataan dan pemulihan lingkungan lokasi bekas PETI di Gunung Botak dan Gogorea;
- m. Keputusan Gubernur Maluku Nomor 382/2016 tanggal 22 November 2016 tentang perubahan atas Keputusan Gubernur Nomor 268/2016 tentang penataan dan pemulihan lingkungan lokasi bekas PETI di Gunung Botak dan Gogorea;
- n. Keputusan Gubernur Maluku Nomor 81/2017 tanggal 28 Februari 2017 tentang pembentukan tim kajian terpadu penyelesaian permasalahan penambangan emas tanpa izin di Gunung Botak dan Gogorea;
- o. Keputusan Gubernur Maluku Nomor 84/2017 tanggal 28 Februari 2017 tentang penertiban kegiatan penambang emas tanpa izin di lokasi bekas PETI Gunung Botak dan Gogorea.

B. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pertambangan Tanpa Izin di Kepolisian Resort Pulau Buru

Munculnya tambang emas di Gunung Botak Kabupaten Buru menjadi harapan baru bagi masyarakat, khususnya untuk meningkatkan kesejahteraan penambang skala kecil. Namun, tidak dapat dihindari bahwa penambang skala kecil tersebut merupakan faktor dari keberadaan PETI yang merupakan suatu perbuatan pidana.

Tindak pidana pertambangan tanpa izin (*illegal mining*) atau disebut PETI merupakan kejahatan yang dilakukan oleh orang perseorangan, kelompok atau masyarakat, dan yayasan atau badan usaha berbadan hukum yang dalam operasi produksinya tidak memiliki izin dari instansi pemerintah yang berwenang, dan apabila melakukannya maka akan mendapatkan sanksi pidana sesuai peraturan yang berlaku.

Ketentuan pidana terhadap tindak pidana pertambangan tanpa izin terdapat dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang diatur dalam Pasal 158, Pasal 160 ayat (1) dan (2), Pasal 161, Pasal 163 ayat (1) dan (2), dan Pasal 164.

PETI kini sudah tumbuh dan berkembang kian marak di Pulau Buru. Ini menjadi tuntutan baru bagi pemerintah dan aparat penegak hukum untuk menyelesaikannya, pasalnya, keberadaan PETI dapat menimbulkan dampak yang sangat mempengaruhi keberlangsungan hidup manusia terutama masyarakat Buru. Kegiatan PETI memang membawa dampak finansial yang positif bagi mereka yang melakukannya dan bagi penduduk sekitar area tambang, seperti meningkatnya penghasilan dan terbukanya lapangan pekerjaan, tetapi di sisi lain apa yang mereka lakukan merupakan perbuatan melanggar hukum serta memiliki dampak negatif

terhadap kegiatan PETI yang tidak terkendali seperti keadaan di Gunung Botak Kabupaten Buru. Maraknya PETI yang dilakukan oleh masyarakat bukan terjadi tanpa alasan, banyak faktor yang mempengaruhi perkembangannya. Untuk itu, dirasa perlu penulis jabarkan terlebih dahulu faktor serta dampak dari keberadaan PETI di Pulau Buru, sebagai berikut:

1. Faktor penyebab terjadinya PETI

Faktor yang menjadi alasan berkembangnya PETI yang didapati pihak Kepolisian Resort Pulau Buru, diantaranya¹:

- a. Faktor ekonomi

Sebagian besar penduduk baik lokal maupun para transmigran bekerja sebagai petani, nelayan, buruh, yang berpenghasilan tidak seberapa menjadikan masyarakat mengambil jalan pintas melakukan penambangan secara ilegal dengan adanya tambang emas di Pulau Buru ini.

Keterbatasan keahlian pelaku usaha dan sempitnya lapangan kerja, menyebabkan usaha pertambangan ini menjadi pilihan utama. Tambang emas dianggap menghasilkan penghasilan yang besar dan cepat menguntungkan. PETI memberikan penghasilan bagi rakyat penambang, apalagi yang diusahakan di lahan-lahan warisan turun-temurun.

¹ Hasil wawancara dengan AIPTU Syarifudin selaku kepala Unit Tipiter Kepolisian Resort Pulau Buru, pada tanggal 12 Februari 2018, pukul 11.00 WIT

- b. Modal usaha relatif kecil dan pelaksanaan penambangan dilakukan secara sederhana/tradisional tanpa menggunakan peralatan berteknologi tinggi

PETI yang sebagian besar merupakan para penambang skala kecil dengan alasan keterbatasan ekonomi tentu tertarik dengan usaha tambang ilegal yang tidak memerlukan biaya besar. Pada umumnya PETI di Gunung Botak hanya perlu membayar biaya masuk di area tambang dan biaya untuk mendapat kartu tambang dari pemilik tanah yang diklaim merupakan tanah adat milik beberapa marga di Pulau Buru.

Selain itu, para penambang ilegal skala kecil menganggap dirinya tidak perlu terikat dengan peraturan yang melarang penggunaan alat berat, bahan peledak serta penggunaan bahan kimia berbahaya yang melampaui batas.

- c. Birokrasi perizinan yang rumit

Pelaku usaha beranggapan bahwa prosedur pengurusan izin usaha pertambangan melalui jalur birokrasi yang rumit dan memerlukan waktu panjang, sehingga cenderung menimbulkan biaya tinggi.

Pada umumnya perizinan yang dikeluarkan oleh Dinas ESDM Provinsi Maluku, dalam hal ini IUP Eksplorasi, IUPK Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian, dan IUJP, diharuskan memenuhi syarat administratif, syarat teknis, syarat lingkungan, dan

syarat finansial. Kesemua syarat tersebut tentu membutuhkan biaya yang tidak sedikit dan waktu yang lama, terutama untuk mengeluarkan izin, pemohon izin haruslah yang memiliki kemampuan materi yang dapat dipertanggung jawabkan.²

Para penambang di Gunung Botak yang mayoritas penambang skala kecil tentu merasa sulit untuk mengajukan proses perizinan sehingga PETI menjadi pilihan daripada mengajukan perizinan yang dirasakan mahal, sulit, dan lama. Hal ini terbukti dengan sedikitnya pihak yang mengantongi izin tambang di Gunung Botak yakni hanya ada 3 (tiga) perusahaan yang memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) di area tambang Gunung Botak. Perusahaan tersebut antara lain³:

- a) PT. Buana Pratama Sejahtera dengan tahapan kegiatan Operasi Produksi Khusus (OPK) Pengolahan dan Pemurnian
- b) PT. Prima Indo Persada dengan tahapan kegiatan Operasi Produksi Khusus (OPK) Pengolahan dan Pemurnian
- c) PT. Citra Cipta Prima dengan tahapan Operasi Produksi Penjualan

Perusahaan yang memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) tersebut juga bekerjasama dengan pemerintah untuk penataan dan pemulihan lokasi tambang di Gunung Botak Kabupaten Buru dalam hal ini melakukan pengangkatan sedimen untuk normalisasi aliran

² Hasil wawancara dengan Ir. June Pattikawa selaku kepala bidang Pertambangan Umum di kantor Dinas ESDM Provinsi Maluku

³ Data hasil survey yang diperoleh peneliti dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Maluku, pada tanggal 20-23 Februari 2018, pukul 10.00 WIT

sungai sekitar lokasi tambang. Perusahaan tersebut juga berhak mengangkut dan menjual hasil komoditas tambang yang telah diolah atau dimurnikan serta melakukan kerja sama dengan perusahaan lain untuk melakukan penjualan.

d. Adanya konflik antara UU Minerba dengan UU Pemda

Eksistensi PETI dapat disebabkan pula oleh faktor konflik norma antara Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (UU Pemda). Konflik norma yang terjadi yakni konflik norma terkait kewenangan perizinan, yaitu bila dahulu berdasarkan UU Minerba IUP dan IPR permohonannya diajukan ke bupati/walikota, namun sekarang sesuai UU Pemda permohonannya harus diajukan ke gubernur. Begitu pula kewenangan pembinaan dan pengawasan yang dahulu berada di pemerintah kabupaten/kota kemudian dialihkan ke pemerintah provinsi.

Tentu dalam hal terjadi konflik antara norma perundang-undangan ini berlaku asas *lex posteriori derogate legi priori* dimana undang-undang yang baru mengesampingkan undang-undang yang lama maka, UU Minerba harus mendasarkan dan menyesuaikan dengan peraturannya pada UU Pemda, hal ini juga diatur secara tegas dalam Pasal 407 UU Pemda.

Dalam UU Pemda diatur bahwa kewenangan IUP/IUPK dan IPR berada dalam kewenangan gubernur, namun secara geografis

banyak wilayah di Indonesia yang sulit untuk menjangkau ibukota provinsi, seperti lokasi tambang yang berada di Gunung Botak Kabupaten Buru untuk membuat permohonan izin harus ke ibu kota Provinsi Maluku, yakni Ambon dengan menyeberangi pulau menggunakan kapal ataupun pesawat. Proses pengajuan izin menjadi tidak efisien karena memerlukan biaya dan waktu lama dan pada akhirnya penambang memilih untuk tidak mengajukan izin usaha.

Termasuk mengenai kewenangan pembinaan dan pengawasan yang dulu dimiliki oleh pemerintah kabupaten/kota, saat ini beralih ke pemerintah provinsi yang berakibat jauhnya rentang pembinaan dan pengawasan.

- e. Lemahnya kesadaran pelaku usaha PETI terhadap hukum atau peraturan pertambangan

Kesadaran hukum merupakan bagaimana cara seseorang untuk memahami hukum itu sendiri. Kesadaran hukum pada masyarakat belumlah merupakan proses sekali jadi, melainkan merupakan suatu rangkaian proses yang terjadi tahap demi tahap, kesadaran hukum masyarakat sangat berpengaruh terhadap kepatuhan hukum, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Masyarakat lokal yang berada di Pulau Buru terutama yang tinggal di sekitar wilayah tambang (biasa disebut orang gunung) pada umumnya minim akan pendidikan, bahkan saat berkomunikasi diantara mereka masih ada yang menggunakan bahasa daerah Buru dikarenakan tidak mengerti dengan bahasa Indonesia. Bisa dilihat

bahwa dengan minimnya pengetahuan ini tentu mengenai peraturan perundang-undangan mereka tidak memahaminya. Hukum bagi mereka adalah hukum adat dimana mereka hanya patuh terhadap kepala adat. Hal ini memicu adanya PETI, apalagi beberapa pemilik tanah yang menjadi area tambang merupakan tanah milik orang gunung, dimana yang mereka tahu akan mendapatkan keuntungan dari biaya masuk area tambang dan biaya untuk mendapatkan kartu tambang apabila membiarkan penambang ilegal menggunakan area mereka untuk menambang.

Sementara penduduk lokal yang berpendidikan, para transmigran, masyarakat dari luar daerah yang menjadi PETI, paham terhadap adanya peraturan hukum yang melarang melakukan pertambangan secara ilegal, tetapi tidak lagi menghiraukan aturan yang wajib untuk dipatuhi tersebut. Penyebabnya kembali lagi kepada faktor ekonomi.

2. Dampak adanya PETI

Dampak yang terjadi dari adanya pertambangan tanpa izin di Gunung Botak Kabupaten Buru sebagai berikut:

a. Dampak Lingkungan

PETI dilakukan dengan praktik pertambangan yang seadanya atau tidak melalui penerapan *good mining practices*, padahal dalam perusahaan pertambangan terdapat kaidah-kaidah teknik dan

lingkungan yang harus dipatuhi.⁴ Apabila hal tersebut tidak dilaksanakan maka akan merusak dan mencemari lingkungan hidup.

Telah diketahui bahwa penambangan emas di Gunung Botak sendiri menggunakan merkuri melebihi batas dalam pengelolaan mineral logam berupa emas. Merkuri bahkan sudah masuk ke dalam tubuh manusia, baik melalui udara maupun ontrol pada rantai makanan.⁵ Kadar merkuri yang ditemukan mencapai 18 (delapan belas) ontrol per 1 (satu) kilogram sampel atau 36 (tiga puluh enam) kali dari standar.⁶ Kerusakan lingkungan hidup yang terjadi diantaranya⁷:

- a) Kerusakan tanah, yang mengandung zat kimia seperti *Fe*, *SO₄*, *Mg* dan *Pb* yang bersifat beracun;
- b) Ancaman tanah longsor yang mengancam keselamatan penambang;
- c) Erosi tanah, penggalian yang berpotensi mengalami erosi karena tidak adanya vegetasi penutup tanah;
- d) Pencemaran air, secara langsung kali Anahoni telah tercemar akibat limbah yang mengandung belerang (b) dan merkuri (Hg) dan sianida yang mengandung logam berat. Aliran kali Anahoni menjadi keruh akibat pembuangan sisa hasil rendaman, tambak larut dan dompeng;

⁴ Ahmad Redi, *op.cit*, hlm. 140

⁵ [Http://print.kompas.com/baca/2015/12/30/Pemerintah-Diminta-Fokus-Bersihkan-Merkuri-Dampak](http://print.kompas.com/baca/2015/12/30/Pemerintah-Diminta-Fokus-Bersihkan-Merkuri-Dampak) (diakses pada 14 Maret 2018)

⁶ *Ibid.*

⁷ Data hasil survey yang diperoleh peneliti dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buru, pada tanggal 15 Februari 2018, pukul 09.00 WIT

- e) Hutan dan lahan pertanian menjadi rusak;
- f) Pencemaran air laut dan kawasan hutan mangrove dalam Teluk Kaiely dan sekitarnya.

b. Dampak Penerimaan Negara

Terhadap usaha pertambangan yang sah setidaknya terdapat beberapa pajak yang dibayarkan oleh pemegang izin usaha pertambangan, antara lain Pajak Bumi Bangunan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penghasilan, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, penerimaan negara bukan pajak dariontrol dan iuran tetap.

Di Gunung Botak biaya masuk lokasi tambang merupakan biaya transaksi politik karena biaya yang dikeluarkan penambang merupakan biaya legalisasi usaha secara sepihak oleh pemerintah adat tanpa izin resmi dari pemerintah daerah. Biaya masuk sekaligus kartu penambang dibayar kepada soa-soa (marga-marga) adat yang mempunyai hak atas tanah dilokasi pertambangan seperti marga Wael (Raja Kayeli/Kepala Desa), marga Nurlatu, marga Belen dan marga Besan. Surat izin penambang dikeluarkan oleh ketua dari marga-marga adat yang telah mendapat persetujuan dari hasil musyawarah pemerintahan adat petuanan dataran Waeapo. Kartu penambang sesuai dengan biaya masuk yang telah disepakati masyarakat adat.⁸

Biaya yang dikeluarkan oleh penambang untuk dapat masuk ke lokasi pertambangan sebesar Rp.750.000 per orang untuk tiga bulan

⁸ Hasil wawancara dengan AIPTU Syarifudin selaku kepala Unit Tipiter Kepolisian Resort Pulau Buru, pada tanggal 12 Februari 2018, pukul 11.00 WIT

usaha (khusus laki-laki) dan Rp.500.000 per orang/tiga bulan usaha (khusus perempuan), Sedangkan untuk buruh pikul penambang (kijang) Rp.1.000.000 per orang untuk tiga bulan usaha. Surat izin usaha sangat mudah diperoleh hanya dengan biaya masuk, foto dan kartu identitas diri (KTP/SIM) masyarakat sudah bisa mendapat kartu penambang.

Kartu penambang ini terus dijual walaupun ada upaya penutupan dari pemerintah daerah namun penutupan hanya berlangsung sementara saja, upaya penutupan lokasi pertambangan liar ini dapat dilihat dari surat Bupati Kabupaten Buru kepada Ketua persekutuan adat dataran Waeapo masyarakat adat petuanan kayeli serta kepada Hinolong Baman yaitu Surat Bupati Nomor 047/23 Tanggal 21 Februari 2013 Perihal Pemberitahuan Penghentian Pungutan dan Penutupan Lokasi Tambang dan Surat Bupati Buru kepada Hinolong/Ketua Persekutuan Adat Dataran Waeapo Nomor 047/24 Tanggal 22 Februari 2013. Tidak ada pajak yang masuk kepada pemerintah daerah karena usaha pertambangan ini masuk dalam usaha tanpa izin (PETI).⁹

Selain itu, kerusakan lingkungan dan beban sosial akibat PETI tentu akan ditanggung oleh negara, seperti pemulihan lahan melalui rehabilitasi dan reklamasi.

c. Dampak Konflik Sosial

⁹ Hasil wawancara dengan AIPTU Syarifudin selaku kepala Unit Tipiter Kepolisian Resort Pulau Buru, pada tanggal 12 Februari 2018, pukul 11.00 WIT

Sampai saat ini, kegiatan pertambangan telah menjadi sumber dari berbagai konflik yang disebabkan oleh kebijakan dan ketidakpastian regulasi atas penggunaan tanah dan hak milik, pertambangan rakyatontrol, polusi dan dampak lingkungan, serta ketidakpastian seputar mata pencaharian warga setempat apabila adanya penutupan tambang.

Lokasi tambang emas Gunung Botak berada di atas tanah adat yang dimiliki oleh beberapa marga adat. Sejak ditemukannya kandungan emas, antar marga adat tidak terhindar dari pertikaian yang memperebutkan soal tanah. Pihak satu dengan lainnya mengklaim bahwa lokasi tambang merupakan tanah milik marganya, sebab tidak ada bukti tertulis yang menyebutkan kepemilikannya. Klaim didasarkan pada wilayah petuanan atau Raja, sedangkan Gunung Botak berada pada perbatasan beberapa petuanan. Ini lah yang menyebabkan adanya kesenjangan sosial diantara masyarakat adat setempat. Selain itu, berbagai macam tindak kriminal mulai didapati di Pulau Buru khususnya di sekitar daerah tambang, yakni adanya pembunuhan, prostitusi, pencurian, penipuan, dan lain sebagainya akibat mobilisasi masyarakat luar daerah yang datang dengan berbagai modus.¹⁰

d. Dampak Kesehatan, Keselamatan, dan Keamanan Kerja (K3)

Kegiatan pertambangan memiliki potensi risiko yang besar apabila mekanisme K3 tidak diterapkan dengan baik. Di Gunung Botak

¹⁰ Hasil wawancara dengan AKP M. Ryan Citra Yudha, S.I.K. selaku Kasat Reskrim Polres Pulau Buru, pada tanggal 7 Februari 2018, pukul 11.00 WIT

sendiri banyak terdapat korban jiwa dan orang hilang akibat tertimbun longsor saat melakukan penggalian tanah untuk mencari kandungan emas yang membentuk lubang-lubang tikus. Bukan hanya keamanan dan keselamatan kerja, PETI di Gung Botak menggunakan merkuri yang jelas dapat mengganggu kesehatan.¹¹

Dari uraian di atas, dapat diketahui bahwa meskipun PETI menjadi salah satu dari kegiatan yang sangat menguntungkan masyarakat, tetapi banyak dampak negatif yang terjadi dikemudian hari. Untuk mengurangi resiko yang ditimbulkan PETI, sudah barang tentu menjadi tugas penegak hukum untuk mengatasinya, karena berkaitan dengan aturan yang dilanggar oleh para penambang liar tersebut.

Dalam hal penegakan hukum terhadap tindak pidana pertambangan tanpa izin di Gunung Botak Kabupaten Buru, pihak Kepolisian Resort Pulau Buru tidak dapat dikatakan berhasil sepenuhnya, sebab sejak tahun 2011 hingga 2018 saat ini masih didapati PETI yang melakukan kegiatan penambangan secara ilegal.

Kegiatan PETI di Gunung Botak sudah dimulai sejak tahun 2011. Saat itu tambang emas di Gunung Botak dibuka secara bebas. Berbagai lapisan masyarakat berdatangan untuk mengambil keuntungan dari tambang tersebut, baik masyarakat adat setempat, masyarakat Pulau Buru, para transmigran yang sudah menetap di Pulau Buru sejak lama, dan masyarakat yang berasal dari luar Pulau Buru. Pada periode 2014, dalam melaksanakan tugasnya sebagai aparat penegak hukum pihak kepolisian melakukannya tanpa dukungan dari pemerintah. Hanya 2 (dua) kasus

¹¹ Hasil wawancara dengan AKP M. Ryan Citra Yudha, S.I.K. selaku Kasat Reskrim Polres Pulau Buru, pada tanggal 7 Februari 2018, pukul 11.00 WIT

yang diproses berdasarkan laporan masyarakat yang menemukan beberapa orang melakukan pertambangan dengan menyusupkan mesin dompeng secara ilegal. Hingga sampai pada tanggal 6 Mei 2015 saat kunjungan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo di Kecamatan Waeapo Kabupaten Buru dalam rangka panen raya, Presiden membuat direktif kepada Pemerintah Provinsi Maluku untuk menutup dan menghentikan aktivitas PETI di Gunung Botak.¹²

Oleh karenanya pemerintah melalui keputusan dan surat edaran oleh Gubernur Maluku berupaya melakukan penutupan area tambang di Gunung Botak, salah satunya dilihat pada Surat Gubernur Maluku Nomor 543/2566 tanggal 28 September 2015 kepada Dirjen Minerba Kementrian ESDM RI tentang penataan pada lokasi PETI Gunung Botak dan Gogorea oleh Pemerintah Provinsi dengan langkah-langkah:

- Melakukan pembersihan dan pengosongan lokasi
- Melakukan pengelolaan terhadap limbah merkuri
- Melaksanakan penataan lokasi
- Menerapkan sistem pertambangan yang baik

Pemerintah Provinsi Maluku bekerjasama dengan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral serta aparat Kepolisian dan TNI melakukan upaya preventif dengan memberikan sosialisasi, pembinaan serta pengawasan terhadap para penambang yang berada di area Gunung Botak dan sekitarnya. Pembinaan dan pengawasan oleh pemerintah dilakukan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara.

¹² Hasil wawancara dengan AKP M. Ryan Citra Yudha, S.I.K. selaku Kasat Reskrim Polres Pulau Buru, pada tanggal 7 Februari 2018, pukul 11.00 WIT

Berdasarkan hasil wawancara penulis, AKP M. Ryan Citra Yudha, S.I.K. mamaparkan bahwa tidak cukup hanya melakukan penutupan lokasi tambang di Gunung Botak Kabupaten Buru, sebab setelah dilakukannya pembinaan dan penertiban, para PETI kembali berdatangan ke lokasi tambang untuk mengambil emas Gunung Botak secara ilegal. Oleh karenanya Sat Reskrim Polres Pulau Buru mengambil langkah untuk menindaklanjuti para penambang liar tersebut ke jalur hukum guna memberikan efek jera terhadap masyarakat agar tidak lagi melakukan penambangan secara ilegal. Upaya pihak kepolisian yang dimaksud yakni dengan melakukan penyelidikan dan penyidikan.¹³

Proses penyelidikan dilakukan berdasarkan Pasal 4, Pasal 5, Pasal 16, Pasal 37, Pasal 102, Pasal 103, Pasal 104, Pasal 105, Pasal 108, Pasal 111 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP. Penyelidikan yang dimaksud dilakukan dengan tahapan sebagai berikut¹⁴:

1. Pengumpulan dan pengkajian dokumen;
 - a. Legalitas formal atau perizinan yang dimiliki oleh badan usaha tersebut dalam menjalankan usaha pertambangannya, baik dokumen yang menyangkut pendirian perusahaan seperti akta perusahaan NPWP, TDP maupun yang berkaitan dengan usaha pertambangannya IUP, IPR, IUPK;
 - b. Pejabat yang berwenang mengeluarkan perizinan berkaitan IUP, IPR, IUPK;

¹³ Hasil wawancara dengan AKP M. Ryan Citra Yudha, S.I.K. selaku Kasat Reskrim Polres Pulau Buru, pada tanggal 7 Februari 2018, pukul 11.00 WIT

¹⁴ Data hasil survey yang diperoleh peneliti dari Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resort Pulau Buru, pada tanggal 9 Februari 2018, pukul 11.00 WIT

- c. Peraturan perundanga-undangan terkait pertambangan secara cepat dan akurat seperti Perda tentang RTRW kabupaten/provinsi.
2. Penentuan target operasi (badan usaha, koperasi, perorangan dan lokasi penambangan;
 - a. Pelaku pertambangan perorangan atau badan usaha atau koperasi;
 - b. Lokasi mana kegiatan usaha pertambangan tersebut dijalankan;
 - c. Jika lokasinya di darat harus ditentukan apakah berada di dalam kawasan hutan, di luar kawasan hutan, di area perkebunan, atau di atas tanah yang sudah ada hak milik pihak lain, karena hal ini akan menentukan aturan hukum mana yang akan diterapkan terhadap pelaku baik yang berstatus badan hukum atau perseorangan, dan bagaimana dampak terhadap lingkungan sejak kegiatan usaha pertambangan dijalankan di lokasi tersebut.
3. Pulbaket melalui wawancara tertutup (posisi dan kondisi TKP, kondisi masyarakat lingkaran tambang, pelaku usaha legalitas perjanjian, jumlah tenaga kerja, saran dan peralatan yang digunakan);
4. Observasi kegiatan operasional di area penambang;
5. Pengambilan titik koordinat dan dokumentasi;
6. Pengecekan kelengkapan dan legalitas perizinan;
7. Koordinasi lisan dengan para ahli untuk kajian yuridis awal;
8. Kesimpulan hasil penyelidikan minimal berisi fakta-fakta telah terjadi dugaan tindak pidana *illegal mining* yang memenuhi unsur-unsur pasal dalam undang-undang yang akan dipersangkakan, sehingga perlu ditindaklanjuti untuk proses penyidikan atau sebaliknya. Keakuratan

proses penyelidikan merupakan titik awal keberhasilan proses penyidikan, sehingga memudahkan proses penyidikan lebih lanjut.

Selanjutnya proses penyidikan yang dilakukan pihak Kepolisian Resort Pulau Buru yakni serangkaian tindakan penyidik berdasarkan KUHAP dengan mencari serta mengumpulkan bukti.¹⁵ Untuk mendapatkan bukti tersebut dapat digali dari keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP. tahapan penyidikan yang dimaksud adalah sebagai berikut¹⁶:

1. Tahap tindakan penanganan di Tempat Kejadian Perkara (TKP)
 - a. Persiapan yaitu *mapping* posisi bukaan tambang, pengorganisasian personil, tenaga ahli pengambilan titik koordinat dan peralatannya, penyiapan administrasi penyidikan, logistik, dan sarana transportasi;
 - b. Pelaksanaan awal yaitu tim lidik mendahului ke TKP untuk memastikan kegiatan pertambangan; segera setelah ada laporan dari lidik, dilakukan penindakan, yaitu menghentikan kegiatan operasional pertambangan, mengumpulkan dan menginventarisir para pekerja untuk dijadikan saksi sesuai jenis pekerjaannya. melakukan pengeledahan guna mencari barang bukti;
 - c. Menutup dan mengamankan TKP;

¹⁵ Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP

¹⁶ Data hasil survey yang diperoleh peneliti dari Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resort Pulau Buru, pada tanggal 12 Februari 2018, pukul 11.00 WIT

- d. Memerintahkan orang yang berada di TKP pada waktu itu terjadinya tindak pidana untuk tidak meninggalkan TKP dan mengumpulkan di luar batas yang telah dibuat;
- e. Minta bantuan masyarakat setempat untuk menyaksikan penindakan di TKP;
- f. Mengamankan dan melakukan penyitaan barang bukti alat serta membuat berita acara penyitaan barang bukti;
- g. Mencari, mengumpulkan dan mencatat identitas lengkap saksi-saksi yang berada di TKP untuk dimintai keterangan tentang peristiwa yang terjadi dalam kegiatan pertambangan;
- h. Melakukan pemotretan dengan maksud untuk mengabadikan situasi TKP termasuk keberadaan saksi-saksi, kegiatan/aktivitas pertambangan dan barang bukti yang berada di TKP dan untuk memberikan gambaran nyata tentang situasi dan kondisi TKP serta membuat berita acara pemotretan;
- i. Membuat sketsa TKP;
- j. Untuk penyitaan TKP lokasi tambang terlebih dahulu harus mengajukan surat izin penyitaan kepada ketua PN setempat, karena berkaitan dengan area/lokasi tambang bukan benda bergerak;
- k. Setelah dilakukan pengolahan TKP, maka langkah penyidik selanjutnya mencari barang bukti dokumen atau surat, karena persoalannya mengarah pada perizinan;
- l. Penyidik mencari aturan-aturan lain meskipun yang derajatnya lebih rendah baik Perda maupun SK gubernur/bupati/walikota.

2. Penanganan barang bukti

- a. Penyitaan barang bukti (Pasal 38 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 39 ayat (1) KUHAP);
- b. Administrasi penyidikan yang dibuat berkaitan dengan penyitaan berupa surat perintah penyitaan, berita acara penyitaan, surat permohonan izin penyitaan (Pasal 38 ayat (1) KUHAP);
- c. Pelelangan barang bukti (Pasal 45 KUHAP);

3. Pemeriksaan saksi-saksi

Diawali dengan proses pemanggilan (Pasal 7 ayat (1) huruf g, Pasal 11, Pasal 112 ayat (1), Pasal 117 ayat (!) KUHAP). Materi pemeriksaan saksi setidaknya memuat memenuhi jawaban atas pertanyaan 7 (tujuh) yaitu siapakah, apakah, dimanakah, dengan apakah, mengapa, bagaimanakah, dan bilamanakah;

4. Pemeriksaan ahli

Berkaitan dengan pembuktian tergantung dari fakta kasusu yang dipersoalkan dan memerlukan pendapat ahli, karena dengan semakin kompleksnya kasus pertambangan, maka selalu diperlukan keterangan ahli sebagaimana diatur dalam Pasal 120 ayat (1) dan Pasal 184 ayat (1) KUHAP;

5. Pemeriksaan tersangka

Diawali dengan proses pemanggilan maupun penangkapan, penentuan status tersangka didasari bahwa seseorang diduga keras mempunyai peran sebagai tindak pidana *illegal mining* yang terjadi atas dasar bukti permulaan yang cukup, perlu segera didengar keterangannya

dan diperiksa. Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap tersangka, dilakukan analisis oleh penyidik maupun dilakukan gelar perkara internal. Apabila memenuhi unsur pidana berdasarkan hasil pemeriksaan, maka penyidik dapat melakukan penahanan berdasarkan Pasal 7 ayat (1) huruf d, Pasal 11, Pasal 20, dan Pasal 24 KUHAP. Hak-hak tersangka dalam proses pemeriksaan tetap harus diberikan (Pasal 116 ayat (3) KUHAP);

6. Penyelesaian dan penyerahan berkas perkara

Tahap selanjutnya adalah penyelesaian dan penyerahan berkas perkara kepada Kejaksaan/Penuntut Umum (Pasal 110 ayat (1) KUHAP) yang merupakan kegiatan akhir dari proses penyidikan tindak pidana pertambangan tanpa izin (*illegal mining*).

Proses penyelidikan dan penyidikan dilakukan berdasarkan prosedur yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana. Sedangkan dasar hukum yang menjadi acuan dalam pengenaan sanksi terhadap tersangka pada umumnya yaitu¹⁷:

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;

¹⁷ Data hasil survey yang diperoleh peneliti dari Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resort Pulau Buru, pada tanggal 12 Februari 2018, pukul 11.00 WIT

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pengesahan *Minimata Convention On Mercury* (Konvensi Minimata Mengenai Merkuri).

Dari hasil penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh Kepolisian Resort Pulau Buru, berikut total kasus tindak pidana pertambangan tanpa izin yang telah ditangani di Gunung Botak Kabupaten Buru.

Tabel 4.1

Jumlah kasus pertambangan tanpa izin di Kabupaten Buru Maluku
periode 2014 s/d 2017

Tahun	Jumlah laporan	Jumlah laporan selesai	Jumlah laporan belum selesai	Presentase (%) laporan selesai	Presentase (%) laporan belum selesai
2014	2	2	-	100%	-
2015	-	-	-	-	-
2016	14	2	12	14,28%	85,71%
2017	6	-	6	-	100%
Jumlah	22	4	18		

Sumber: *Data Sekunder, diolah 2018*

Berdasarkan tabel di atas, bahwa tindak pidana pertambangan tanpa izin yang ditangani oleh Polres Pulau Buru pada tahun 2014 terdapat 2 (dua) kasus yang dilaporkan dan telah selesai diproses sehingga persentasenya adalah 100% kasus selesai. Pada tahun 2015 tidak ada kasus yang diproses dikarenakan adanya penertiban lokasi tambang secara keseluruhan. Tahun 2016 kasus yang diproses ada 14 (empat belas) kasus, yang telah selesai baru 2 (dua) kasus, dan 12 (dua belas) kasus lainnya belum diselesaikan sehingga persentase yang didapat adalah 85,71% untuk kasus yang sudah selesai dan 14,28% untuk kasus yang belum selesai.

Kemudian pada tahun 2017 terdapat 6 kasus dan belum ada yang diselesaikan untuk itu persentasenya 100% kasus belum selesai. Jadi jumlah kasus mengenai tindak pidana pertambangan tanpa izin di Kabupaten Buru di tahun 2016 sampai dengan 2017 adalah 22 (dua puluh dua) kasus, dan kasus yang diselesaikan atau yang berhasil dilimpahkan ke Kejaksaan hanya 4 (empat) kasus.

Dalam pengenalan pasalnya, 95,45% dari 22 kasus dikenakan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara berkaitan dengan penambangan yang tanpa memiliki izin, dan 4,54% sisanya dikenakan Pasal 161 yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian barang tambang.

Kasus yang menjadi sampel oleh pihak kepolisian untuk memberikan efek jera bagi masyarakat tersebut nyatanya tidak efektif. Berdasarkan tembusan Laporan Aktivitas Penambangan di Gunung Botak oleh Bupati Buru, jumlah penambang emas kembali bertambah. Tercatat sampai 2017 diperkirakan sebanyak 13.000 (tiga belas ribu) penambang yang berasal dari luar daerah, masyarakat pesisir dan masyarakat sekitar. Terdapat \pm 310 buah pengolah emas rendaman, \pm 15 buah tambak larut, dompeng dan tromol yang beroperasi secara sporadis di berbagai tempat. Aktivitas pengelolaan emas tersebut menggunakan bahan kimia seperti *Sianida* dan *Merkuri* dengan jumlah yang banyak.¹⁸

Masyarakat terbukti tidak menurutkan niatnya untuk melakukan pertambangan meskipun secara ilegal sehingga upaya penegakan hukum tidak sepenuhnya berhasil meskipun adanya penurunan jumlah PETI. Hal ini

¹⁸ Data hasil survey yang diperoleh peneliti dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Maluku, pada tanggal 19 Februari 2018, pukul 11.00 WIT

menimbulkan tanda tanya apa yang membuat berbagai upaya baik dari pemerintah maupun kepolisian tidak berjalan sesuai harapan pasalnya, terdapat perbandingan yang sangat jauh antara kasus yang ditangani setiap tahunnya dengan jumlah PETI yang ada. Seperti yang diketahui jumlah kasus yang ditangani periode 2014 sampai dengan 2015 hanya 2 (dua) kasus sedangkan jumlah PETI di periode tersebut mencapai 50.000 jiwa, periode 2016 sampai dengan 2017 polisi menangani 20 (dua puluh kasus) sementara penambang ilegal saat itu masih berkisar 17.000 jiwa dan berkurang menjadi ± 13.000 jiwa. Namun, tentu perbandingan tersebut tidak memiliki dampak efektif dalam penegakan hukumnya.

Teori penegakan hukum dari Friedam melihat bahwa keberhasilan penegakan hukum selalu mensyaratkan berfungsinya semua komponen sistem hukum yakni struktur, substansi, dan kultur atau budaya hukum.

Struktur

Dalam konteks penegak hukum, kepolisian berdampingan dengan pemerintah untuk menghadapi kasus pertambangan tanpa izin. Ada dua upaya yang telah ditempuh yakni upaya preventif oleh pemerintah dan kepolisian, serta upaya represif yang dilakukan oleh kepolisian. Berdasarkan dua upaya tersebut, yang dirasa kurang tegas menurut penulis adalah upaya preventif dimana pemerintah yang bekerjasama dengan kepolisian melakukan pembinaan dan pengawasan secara normatif dengan hanya melakukan penutupan tambang yang kemudian selanjutnya persoalan mengenai PETI dilimpahkan ke kepolisian.

Pemerintah berpatokan pada mekanisme pembinaan dan pengawasan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara dimana, pembinaan dan

pengawasan hanya dilakukan terhadap usaha pertambangan yang regular dalam keadaan normal, sedangkan PETI sebagai usaha pertambangan yang tidak normal bukanlah bagian dari skema pembinaan dan pengawasan sebagaimana diatur dalam PP No. 5 Tahun 2010 tersebut. Tidak adanya pengaturan tersebut dikarenakan mengedepankan penegakan hukum pidana terhadap PETI. Hal ini menimbulkan kepincangan karena seolah PETI hanya menjadi tanggung jawab kepolisian.

Sedangkan upaya represif, jika dilihat dari proses penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Resort Pulau Buru, menurut penulis sudah sesuai dengan standar operasional prosedur penyelidikan dan penyidikan yang terdapat dalam KUHAP dan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana serta penyidikan dan ketentuan pidana yang diatur pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Substansi

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sudah mengatur secara lengkap mengenai ketentuan pidana terhadap penambang tanpa izin maupun yang memiliki izin namun melanggar ketentuan dalam undang-undang tersebut. Selain UU Minerba, terdapat peraturan dibawahnya yang diatur sedemikian rupa oleh pemerintah yang dirasa cukup lengkap dalam mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan pertambangan yang berada di Pulau Buru. Yang menjadi persoalan menurut penulis yakni hanya konflik antara UU Minerba dan UU Pemda mengenai kewenangan pemberian izin usaha serta kewenangan pembinaan dan pengawasan yang sudah penulis uraikan sebelumnya.

Kultur atau Budaya Hukum

Pada tingkat masyarakat yang paling penting adalah tersedianya lapangan pekerjaan dan pendapatan dalam upaya kesejahteraan. Tindakan masyarakat untuk bekerja secara melanggar hukum atau ilegal sangat dipengaruhi oleh kenyataan bahwa anggota masyarakat yang lain juga bekerja demikian. Begitupun yang terjadi di Gunung Botak Kabupaten Buru, dimana masyarakat yang satu mempengaruhi masyarakat yang lain dengan keuntungan yang menggiurkan sehingga ditiru meskipun melanggar hukum.

Peran masyarakat sangat dibutuhkan dalam proses penegakan hukum, selain kesadaran bagi masyarakat yang melakukan PETI, masyarakat yang tidak melakukan PETI juga seharusnya terlibat dalam menangani permasalahan PETI. Kasus pertambangan tanpa izin akan diselidiki apabila ada laporan atau komplain dari masyarakat setempat yang merasa terganggu oleh keberadaan penambangan liar dan tidak diselidiki apabila tidak ada laporan atau komplain sebab kapasitas kepolisian yang terbatas serta pihak kepolisian yang tidak menutup mata akan kebutuhan masyarakat.¹⁹ Namun kenyataan di lapangan, tidak jarang masyarakat sekitar yang enggan memberikan informasi tentang PETI.

Ketidakpedulian terhadap dampak yang ditimbulkan PETI terutama mengenai lingkungan sekitar serta masa depan generasi yang akan datang membuat masyarakat acuh terhadap aturan yang telah dibuat. Masyarakat juga menganggap pemerintah tidak menjamin apapun jika mereka menaati peraturan, yang pada akhirnya membuat mereka terus melakukan pekerjaan ilegal tersebut.

¹⁹ Hasil wawancara peneliti dengan AIPU Syarifudi selaku kepala Unit Tipiter Polres Pulau Buru, pada tanggal 12 Februari 2018, pukul 11.00 WIT

Tidak mudah menangani kasus PETI yang menyangkut banyak jiwa, terlebih ketergantungan masyarakat terhadap tambang emas karena sudah menjadi mata pencaharian mereka yang menyebabkan pihak kepolisian bertindak dengan lebih mendominasi sisi kemanusiaan terhadap para penambang liar.²⁰

C. Kendala Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pertambangan Tanpa Izin di Kepolisian Resort Pulau Buru Maluku serta Upaya untuk Mengatasinya

1. Kendala penegakan hukum tindak pidana pertambangan tanpa izin

Dalam hal penambangan emas ilegal di Gunung Botak Kabupaten Buru merupakan permasalahan antara kelangsungan hidup hari ini dan masa depan, untuk itu sudah seharusnya kegiatan penambangan emas ilegal ini diberantas demi kemakmuran seluruh masyarakat di Kabupaten Buru. Namun, pemberantasan PETI seperti yang penulis uraikan sebelumnya bahwa tak semudah membalikkan telapak tangan. Kepolisian Resort Pulau Buru sebagai lembaga penegak hukum yang memiliki wewenang untuk bertindak memberantas PETI di Gunung Botak Kabupaten Buru menghadapi banyak kendala dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap para pelaku penambangan liar tersebut.

Secara umum kendala penegakan hukum yang dihadapi Kepolisian Resort Pulau Buru terhadap tindak pidana pertambangan tanpa izin adalah:

1. Kendala internal yaitu kendala yang terdapat dalam lingkup instansi Kepolisian Resort Pulau Buru yang merupakan faktor penghambat dalam

²⁰ Hasil wawancara dengan AKP M. Ryan Citra Yudha, S.I.K. selaku Kasat Reskrim Polres Pulau Buru, pada tanggal 7 Februari 2018, pukul 11.00 WIT

melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana pertambangan batuan tanpa izin di Kabupaten Mojokerto, diantaranya adalah :

- 1) Personil penyidik yang tidak memadai di Kepolisian Resort Pulau Buru

Yang dimaksud dengan personil penyidik yang tidak memadai yaitu tidak seimbangnya kuantitas dan kualitas aparat penyidik dengan kasus yang mereka tangani yakni, kasus PETI di Gunung Botak Kabupaten Buru.²¹

Kuantitas yang dimaksud yaitu jumlah anggota penyidik Unit Tindak Pidana Tertentu di Kepolisian Resort Pulau Buru terdapat 5 (lima) anggota penyidik dan tidak seimbang dengan laporan kasus pertambangan emas tanpa izin yang diterima pihak kepolisian. Ada 22 (dua puluh dua) kasus tambang ilegal yang ditangani kepolisian dan baru 4 (empat) kasus yang sudah dilimpahkan ke Kejaksaan selebihnya masih diproses di kepolisian. Oleh karenanya, satu orang penyidik dapat menangani lebih dari tiga kasus. Hal ini tidak sesuai dengan kebutuhan ideal penyidikan yang diatur dalam Pasal 14 ayat (2) Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Republik Indonesia, yang menyatakan bahwa:

Setiap penyidikan untuk satu perkara pidana tidak dibenarkan hanya ditangani oleh satu orang penyidik, melainkan harus oleh Tim Penyidik dengan ketentuan sebagai berikut:

²¹ Hasil wawancara peneliti dengan AIPU Syarifudi selaku kepala Unit Tipiter Polres Pulau Buru, pada tanggal 12 Februari 2018, pukul 11.00 WIT

- a. setiap tim penyidik sekurang-kurangnya terdiri dari dua orang penyidik;
- b. dalam hal jumlah penyidik tidak memadai dibandingkan dengan jumlah perkara yang ditangani oleh suatu kesatuan, satu orang penyidik dapat menangani lebih dari satu perkara, paling banyak tiga perkara dalam waktu yang sama.

Kurangnya jumlah anggota penyidik ini juga yang menyebabkan Kepolisian Resort Pulau Buru melakukan penyelidikan serta penyidikan berdasarkan laporan masyarakat, karena dirasa tidak memungkinkan mengatasi keseluruhan jumlah PETI di Gunung Botak.

Sementara itu, kualitas anggota penyidik kantor Kepolisian Resort Pulau Buru juga tidak memadai dikarenakan belum ada penyidik yang memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkompeten dalam hal menangani kasus kejahatan lingkungan hidup terutama di bidang pertambangan, hal ini ditunjukan dengan dilibatkannya saksi ahli dari Dinas Lingkungan Hidup.

Kuantitas dan kualitas personil penyidik dalam unit tindak pidana tertentu yang belum memadai tersebut menjadi faktor penghambat dalam proses penyidikan terhadap kasus pertambangan emas tanpa izin di Gunung Botak, karena meskipun melibatkan ahli dari Dinas Lingkungan Hidup, penyidik polisi juga harus memiliki pengetahuan tentang lingkungan hidup yang berdampak pada penentuan pemedanaan.

2) Kurangnya sarana dan prasarana

Tidak semua Kesatuan Wilayah Kepolisian Daerah (Polda) memiliki Laboratorium Forensik masing-masing, sehingga Pusat Laboratorium Forensik serta Laboratorium Forensik Cabang harus melakukan koordinasi dengan setiap Kesatuan Wilayah Kepolisian Daerah (Polda).

Kepolisian Resort Pulau Buru sendiri untuk melakukan uji laboratorium atau uji barang bukti, dalam hal ini bahan kimia yang digunakan dalam melakukan pertambangan emas di Gunung Botak yang merupakan barang bukti, harus dilakukan di Sulawesi Utara dikarenakan tidak adanya Laboratorium Forensik di wilayah Maluku. Penyidik dalam melakukan penyidikannya terkait uji barang bukti kurang lebih membutuhkan waktu paling cepat 2 bulan untuk dapat mengetahui kandungan kimia yang digunakan sebagai bahan untuk memurnikan emas oleh penambang liar di Gunung Botak.²²

Kurangnya jumlah Laboratorium Forensik pada setiap Kesatuan Wilayah Kepolisian Daerah (Polda) tentu menjadi penghambat dalam melakukan proses penyidikan karena membutuhkan waktu yang lama dan tidak sesuai dengan asas cepat, efisien, dan profesional serta akuntabel.

2. Kendala eksternal yaitu kendala yang berasal dari luar kepolisian yang ditemukan dalam proses penyidikan, diantaranya:
 - 1) Tidak ada partisipasi aktif dari instansi lain

²² Hasil wawancara peneliti dengan Brigpol I Made Magha Sanjaya selaku anggota penyidik Unit Tipiter Kepolisian Resort Pulau Buru, pada tanggal 14 Februari 2018, pukul 11.00 WIT

Kerjasama antara aparat kepolisian dengan Dinas Energi Sumber Daya Alam atau ESDM khususnya bidang pertambangan umum sangat diperlukan untuk melaksanakan penegakan hukum terhadap penambang emas ilegal ini. Tetapi dalam praktek di lapangan, justru tidak ada kerja sama yang baik antara pihak kepolisian dengan Dinas ESDM.

Kurangnya kerja sama antara Kepolisian Resort Pulau Buru dengan Dinas ESDM Provinsi Maluku dikarenakan dalam melakukan penegakan masing-masing instansi tidak saling berkoordinasi dan hanya jalan sendiri-sendiri dalam melakukan penegakan. Misalnya saja dalam pengawasan serta pembinaan Dinas ESDM selaku perwakilan pemerintah provinsi hanya melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap usaha tambang yang sudah memiliki izin, sedangkan untuk PETI sebagai usaha yang ilegal diserahkan kepada kepolisian karena dianggap menyangkut dengan ketentuan pidana, ditambah lagi dengan persoalan rumitnya prosedur permohonan perizinan di Dinas ESDM, menimbulkan masalah PETI yang berkelanjutan.²³

Selain itu, pemerintah daerah Kabupaten Buru juga seolah menutup mata terhadap PETI. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah membuat pemerintah kabupaten Buru lepas tangan karena menganggap semua

²³ Hasil wawancara peneliti dengan AIPU Syarifudi selaku kepala Unit Tipiter Polres Pulau Buru, pada tanggal 12 Februari 2018, pukul 11.00 WIT

tanggung jawab berada di provinsi baik terhadap PETI maupun dampak yang dihasilkan dari adanya PETI tersebut.²⁴

Dari hal di atas penulis dapat melihat bahwa kurang adanya partisipasi aktif dari pemerintah provinsi maupun kabupaten untuk bekerjasama dengan pihak kepolisian untuk mengatasi masalah PETI di Gunung Botak Kabupaten Buru.

2. Upaya terhadap kendala penegakan hukum tindak pidana pertambangan tanpa izin

Dalam mengatasi hambatan yang dihadapi Kepolisian Resort Pulau Buru untuk menanggulangi tindak pidana pertambangan emas tanpa izin di Gunung Botak Kabupaten Buru, pihak kepolisian melakukan beberapa kebijakan sebagai berikut:

1. Upaya terhadap kendala internal

1) Meningkatkan kualitas dan kuantitas anggota penyidik di Unit Tipiter Polres Pulau Buru

Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan profesional sudah barang tentu diperlukan di dalam lingkup institusi kepolisian agar masyarakat yang dilayani mendapat keadilan yang selayaknya. Maka dari itu perlu dilakukan pembenahan dalam institusi Kepolisian Resort Pulau Buru.

Untuk mengatasi masalah kualitas anggota penyidik, dilakukan pelatihan-pelatihan, diklat, dan evaluasi terhadap personil yang berkaitan dengan tindak pidana pertambangan. Dengan begitu akan

²⁴ Hasil wawancara dengan AKP M. Ryan Citra Yudha, S.I.K. selaku Kasat Reskrim Polres Pulau Buru, pada tanggal 7 Februari 2018, pukul 11.00 WIT

menambah pemahaman para penyidik sehingga tidak perlu mendatangkan ahli dari instansi lain dan akan membuat tahap penyidikan cepat terselesaikan. Sedangkan untuk mengatasi masalah kuantitas dimana kurangnya personil dalam melakukan penyidikan, Sat Reskrim Polres Pulau Buru telah melakukan kerja sama dengan Kepolisian Daerah Maluku (Polda Maluku) guna menambah personil dan merangkap tugas sesuai dengan kewenangannya.²⁵

2) Mengandalkan Rencana Strategi yang disusun Kepolisian Republik Indonesia

Penyelidik maupun penyidik yang berupaya mengenali, mencari, mengambil dan mengumpulkan barang bukti memerlukan ketelitian, kecermatan, dan pengetahuan atau keahlian mengenai bahan atau barang bukti tersebut. Barang bukti yang ditemukan dalam tindak pidana pertambangan pada dasarnya bersifat mikro yang keberhasilan penemuan dan pemeriksaan sangat tergantung terhadap teknologi yang dipergunakan seperti merkuri dan sianida. Oleh karena itu, tahanan ini perlu melibatkan laboratorium forensik. Dari hasil pemeriksaan laboratorium tersebut nantinya dapat dijadikan petunjuk dalam proses penyelidikan/penyidikan lebih lanjut.

Untuk menanggulangi hambatan berupa kurangnya jumlah Laboratorium Forensik pada setiap Kesatuan Wilayah Kepolisian Daerah (Polda) maka Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri)

²⁵ Hasil wawancara dengan AKP M. Ryan Citra Yudha, S.I.K. selaku Kasat Reskrim Polres Pulau Buru, pada tanggal 7 Februari 2018, pukul 11.00 WIT

menyusun rencana strategi jangka menengah maupun jangka panjang untuk menghadirkan Laboratorium Forensik pada setiap Kesatuan Wilayah Kepolisian Daerah (Polda) berupa²⁶:

1) Jangka Menengah berupa meminimalisir *areal service* Laboratorium

Forensik dengan menghadirkan Laboratorium Forensik di wilayah:

- a) Jayapura untuk wilayah kerja Provinsi Irian Jaya.
- b) Manado untuk wilayah kerja Pulau Sulawesi dan Provinsi Maluku.
- c) Balikpapan untuk wilayah kerja Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Kalimantan Utara, dan Provinsi Kalimantan Selatan.
- d) Pontianak untuk wilayah kerja Provinsi Kalimantan Barat dan Provinsi Kalimantan Tengah.
- e) Pekanbaru untuk wilayah kerja Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Riau, Provinsi Jambi, dan Provinsi Kepulauan Riau.

2) Jangka Panjang berupa menghadirkan Laboratorium Forensik pada setiap Kesatuan Wilayah Kepolisian Daerah (Polda) sehingga kebutuhan penyidik terakomodasi.

Upaya jangka menengah saat ini sudah terealisasi oleh Polri, selanjutnya Kepolisian Resort Pulau Buru menantikan upaya jangka panjangnya agar setidaknya untuk meneliti barang bukti tidak jauh-jauh harus ke Manado Sulawesi Utara.²⁷

2. Upaya terhadap kendala eksternal

²⁶ Data hasil survey yang diperoleh peneliti dari Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resort Pulau Buru, pada tanggal 12 Februari 2018, pukul 11.00 WIT

²⁷ Hasil wawancara peneliti dengan Brigpol I Made Magha Sanjaya selaku anggota penyidik Unit Tipiter Kepolisian Resort Pulau Buru, pada tanggal 14 Februari 2018, pukul 11.00 WIT

- 1) Meningkatkan koordinasi dengan ESDM dan pemerintah dalam penegakan hukum tindak pidana pertambangan tanpa izin

Adanya stigma yang timbul bahwa anggota Kepolisian Republik Indonesia (Polri) tidak tegas dan kurang profesional dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, khususnya selaku aparat penegak hukum, sebenarnya tidak dapat dibebankan kepada anggota/institusi Polri semata, namun dipengaruhi pula oleh faktor dari luar, yaitu koordinasi yang lemah dengan instansi penegak hukum lainnya.

Berdasarkan hasil penelitian, pihak Kepolisian Resort Pulau Buru dan Dinas ESDM Provinsi Maluku terlihat berjalan sesuai kewenangannya masing-masing tanpa memperhatikan penegakan hukum yang seharusnya dilakukan dengan bekerja sama secara tegas antar institusi.

Untuk itu, pihak Kepolisian Resort Pulau Buru menyusun strategi guna meningkatkan koordinasi antar instansi penegak hukum demi terwujudnya koordinasi yang sinergis. Dinas ESDM Provinsi Maluku harus dilibatkan dalam proses penegakan hukum bersama kepolisian, seperti aktif dalam melakukan sosialisasi terhadap PETI mengenai dampak yang akan timbul pada diri pelaku serta lingkungan sekitar dan menanamkan pemahaman mengenai peraturan perundang-undangan yang berlaku, ikut melakukan razia pada lokasi tambang serta berpartisipasi dalam melakukan penyidikan.²⁸

²⁸ Hasil wawancara peneliti dengan AIPU Syarifudi selaku kepala Unit Tipiter Polres Pulau Buru, pada tanggal 12 Februari 2018, pukul 11.00 WIT

Dasar yuridis yang melibatkan insitusi lain untuk melakukan proses penyidikan terdapat dalam Kitab Undangundang Hukum Acara Pidana (KUHAP) maupun Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 6 ayat (1) KUHAP menyatakan penyidik adalah:

1. Pejabat polisi Negara Republik Indonesia
2. Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

Bukan hanya menjadi tanggung jawab kepolisian dengan Dinas ESDM, melainkan tugas ini semestinya dijalankan juga oleh pemerintah kabupaten. Meskipun berlakunya UU Penda yang menyatakan kewenangan mengenai tambang berada di provinsi, pemerintah kabupaten sebagai pemilik daerah tempat adanya tambang memiliki tanggung jawab untuk menjaga kesejahteraan masyarakat serta lingkungan, bukan hanya untuk masa sekarang namun juga masa yang akan datang. Upaya yang dapat dilakukan pemerintah kabupaten untuk membantu pihak kepolisian diantaranya bekerja sama dalam melakukan sosialisai terhadap masyarakat khususnya masyarakat adat, kemudian menurunkan satuan polisi pamong praja untuk ikut mengamankan area tambang bersama kepolisian.

Keterlibatan institusi lain yang diberikan kewenangan untuk turut serta dalam melakukan proses penyidikan akan memudahkan dalam pengungkapan tindak pidana mengingat banyaknya kendala yang dihadapi oleh aparat penyidik kepolisian dalam melaksanakan

tugas penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana pertambangan batuan tanpa izin, seperti kendala sumber daya manusia, masalah kuantitas dan kualitas anggota penyidik, dan sebagainya, sehingga peran institusi lain dalam tugas penyidikan dapat membantu proses penegakan hukum.

2) Melakukan fokus penyelidikan dan penyidikan terhadap penggunaan Merkuri oleh PETI

Masalah kepentingan politik yang melibatkan kekuasaan dari beberapa pihak merupakan rahasia umum yang terjadi terkait pertambangan terutama tambang emas. Namun, pihak kepolisian sulit mengabaikan fakta bahwasanya ada banyak pihak dari kalangan bawah yang ikut diuntungkan dengan adanya tambang emas ini, meskipun yang lebih banyak menikmati hasil dari keberadaan PETI adalah pihak-pihak yang berkuasa.

Personil penyidik yang terbatas, kurangnya sarana dan prasarana, sikap acuh dari pemerintah, membuat pihak kepolisian berjalan pincang dalam mengatasi PETI di Gunung Botak. Masyarakat tidak bisa disalahkan dalam hal ini karena sekalipun ditaatinya aturan, tidak ada timbal balik yang setimpal dari pemerintah terhadap mereka untuk kebutuhan hidup yang akan terus berlanjut dan menjadi suatu prioritas.

Untuk itu, dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pengesahan Konvensi Minamata mengenai Merkuri, Kepolisian Resort Pulau Buru khususnya Unit Tipiter Sat Reskrim membuat mekanisme baru dengan memfokuskan

penyelidikan dan penyidikan terhadap penggunaan merkuri baik oleh PETI maupun oleh usaha pertambangan yang telah memperoleh izin. Strategi ini mulai diberlakukan oleh pihak kepolisian sejak November 2017. Dengan demikian PETI di Gunung Botak dibiarkan melakukan aktivitas tambang selama tidak menggunakan bahan kimia merkuri.²⁹

Merkuri atau yang biasa disebut dengan raksa adalah salah satu logam berat yang sangat berbahaya bagi kesehatan dan lingkungan hidup oleh karena bersifat toksik, persisten, bioakumulasi dan dapat berpindah dalam jarak jauh di atmosfer. Dengan bantuan bakteri di sedimen dan perairan, merkuri berubah menjadi metil merkuri yang lebih berbahaya bagi kesehatan karena masuk dalam rantai makanan.³⁰

Penggunaan merkuri dalam kegiatan pertambangan seperti halnya yang terjadi di Gunung Botak tidak sejalan dengan asas pengelolaan pertambangan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Keberadaan prinsip berkelanjutan dan berwawasan lingkungan tersebut diakui oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Terdapat beberapa alasan mendasar digunakannya merkuri dalam kegiatan penambangan emas skala kecil di Gunung Botak Kabupaten Buru yaitu pengetahuan mengenai metode bagaimana menambang emas yang dimiliki oleh masyarakat sebagai penambang

²⁹ Hasil wawancara peneliti dengan AIPTU Syarifudi selaku kepala Unit Tipiter Polres Pulau Buru, pada tanggal 13 Februari 2018, pukul 11.00 WIT

³⁰ Penjelasan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pengesahan Konvensi Minamata mengenai Merkuri

masih sederhana, masyarakat sebagai penambang tidak mengetahui bahwa merkuri yang digunakan dalam tahapan penambangan berbahaya bagi kesehatan lingkungan, dan karena melimpahnya/tersedianya merkuri dengan harga yang terjangkau.

Penyelenggaraan kegiatan pertambangan dengan menggunakan merkuri yang terjadi di Gunung Botak tidak mempertimbangkan segi penjaminan terhadap kesejahteraan masa mendatang bagi Bangsa Indonesia, karena masyarakat akan membayar semua dampak yang ditimbulkan akibat penggunaan merkuri terhadap kesehatan manusia dan lingkungan pada akhirnya.

Hal ini membuat Kepolisian Resort Pulau Buru memilih untuk memberantas terlebih dahulu penggunaan merkuri yang lebih menonjolkan dampak negatif atas penggunaannya.

Dari uraian di atas, dapatlah diketahui bahwa polisi mendapati berbagai kendala yang menghambat jalannya proses hukum, namun demikian, pihak kepolisian tidak hanya tinggal diam dan melakukan upaya-upaya yang diharapkan bisa mengatasi kendala yang terjadi demi terwujudnya penegakan hukum terhadap tindak pidana pertambangan di Gunung Botak.

Sejalan dengan itu, penulis sepakat dengan pemikiran Joseph Goldstein yang sudah lebih dulu dituangkan dalam *actual enforcement theory* dimana dalam penegakan hukum, para penegak hukum tidak dapat melakukan penegakan hukum tersebut secara maksimal. Meskipun peraturan telah dirancang sedemikian rupa namun adanya keterbatasan-keterbatasan menyebabkan penegakan hukum secara sempurna menjadi tidak realistis. Teori tersebut terbukti benar dengan adanya

kendala penegakan hukum oleh Kepolisian Resort Pulau Buru terhadap PETI di Gunung Botak.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab IV, kesimpulan yang dapat penulis ambil adalah:

1. Penegakan hukum yang dilakukan terhadap tindak pidana pertambangan tanpa izin di Kepolisian Resort Pulau Buru adalah:
 - 1) Usaha preventif berupa penutupan area tambang di Gunung Botak Kabupaten Buru oleh Pemerintah Provinsi Maluku yang dibantu oleh aparat Polres Pulau Buru serta aparat TNI.
 - 2) Usaha Represif yaitu tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh Kepolisian Resort Pulau Buru khususnya di Unit Tindak Pidana Tertentu. Proses penyelidikan dan penyidikan dilakukan berdasarkan prosedur yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana. Secara umum proses penyelidikan dan penyidikan dibagi atas penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan penyerahan berkas perkara.
2. Kendala yang dihadapi Kepolisian Resort Pulau Buru dalam melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana pertambangan tanpa izin dibagi 2 (dua), yakni:
 - 1) Kendala internal

- a. Personil penyidik yang tidak memadai di Kepolisian Resort Pulau Buru;
 - b. Kurangnya sarana dan prasarana
- 2) Kendala eksternal
- a. Tidak ada partisipasi aktif dari instansi lain;

Upaya yang dilakukan Kepolisian Resort Pulau Buru terhadap kendala dalam melakukan penegakan hukum tindak pidana pertambangan tanpa izin adalah sebagai berikut:

- 1) Upaya terhadap kendala internal
 - a. Meningkatkan kualitas dan kuantitas anggota penyidik di Unit Tipiter Polres Pulau Buru;
 - b. Mengandalkan Rencana Rekstra yang disusun Kepolisian Republik Indonesia.
- 2) Upaya terhadap kendala eksternal
 - a. Meningkatkan koordinasi dengan ESDM dan pemerintah dalam penegakan hukum tindak pidana pertambangan tanpa izin;
 - b. Melakukan fokus penyelidikan dan penyidikan terhadap penggunaan Merkuri oleh PETI.

B. Saran

Saran yang dapat diberikan dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pertambangan tanpa izin di Kepolisian Resort Pulau Buru adalah sebagai berikut :

1. Dalam melakukan penegakan hukum seharusnya pihak Kepolisian Resort Pulau Buru harus terlebih dahulu memberikan pemahaman secara tegas

bahwa kegiatan usahanya melanggar hukum sehingga sebaiknya penambang melakukan pengurusan izin usaha. apabila mekanisme tersebut tidak diperhatikan oleh masyarakat yang melakukan PETI, barulah dilakukan tindakan pidana;

2. Pihak Kepolisian Resort Pulau Buru melakukan kerja sama dengan pemerintah baik provinsi maupun kabupaten untuk melakukan pembinaan dan pengawasan secara rutin terhadap PETI;
3. Pihak kepolisian, pemerintah dan para pemangku adat duduk bersama untuk membuat kesepakatan dalam memberantas tindak pidana pertambangan emas tanpa izin di Gunung Botak Kabupaten Buru;
4. Pemerintah harus melakukan pembinaan agar penambang skala kecil yang melakukan PETI dapat memiliki izin sehingga menjadi usaha yang sah ataupun menyediakan lapangan kerja yang berpenghasilan setimpal dengan keuntungan yang didapat dari usaha PETI agar masyarakat yang terlibat PETI mau meninggalkan pekerjaan ilegal tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku

- Adami Chazawi, **Pelajaran Hukum Pidana dan Stelsel Pidana**, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2002.
- Ahmad Redi, **Hukum Penyelesaian Sengketa Pertambangan Mineral dan Batubara**. Sinar Grafika, Jakarta, 2017.
- Amiruddin, **Metode Penelitian Hukum**, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Andi Hamzah. **Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana**. Ghalia Indonesia, Jakarta. 2001.
- Andi Prastowo, **Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian**, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2012.
- Gatot Supramono, **Hukum Pertambangan Mineral dan Batu Bara di Indonesia**, Rineka Cipta, Jakarta, 2012.
- H. Salim HS, **Hukum Pertambangan di Indonesia**, Raja Grafindo, Jakarta, 2010.
- _____, **Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara**, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- M. Bakri, **Pengantar Hukum Indonesia Jilid I**, UB Press, Malang, 2011
- Muslan Abdurrahman, **Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum**, UMM Press, Malang, 2009.
- P.A.F. Lamintang, **Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia**. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. 1996.
- Rony Hanitijo Soemitro, **Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri**, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990.

Shant Dellyana, **Konsep Penegakan Hukum**. Liberty, Yogyakarta, 1988.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, **Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat**, Rajawali Pers, Jakarta, 1985.

Sudarto, **Metodologi Penelitian Filsafat**, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.

Tri Hayati, **Era Baru Hukum Pertambangan**, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2015.

Sumber Jurnal

Fenty U. Puluhulawa, **Pengawasan Sebagai Instrumen Penegakan Hukum Pada Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara**, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 11 No. 2 Mei 2011

Nurlaila, **Dampak Aktivitas Pertambangan Terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Tepian Hutan**, Institut Pertanian Bogor, Bogor, 2014

Sumber Internet

Andi Munawarman, **Sejarah Singkat POLRI** (online), http://www.HukumOnline.com/hg/narasi/2004/04/21/nrs_20040421-01.id.html, (11 April 2018), 2004

Dasar-dasar Hukum Pidana, http://usupress.usu.ac.id/files/DASAR-DASAR%20HUKUM%20PIDANA%20FINAL_bab%201.pdf (online)

Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, <http://www.menlh.go.id/deklarasi-pengendalian-pencemaran-dan-kerusakan-lingkungan-akibat-pertambangan/> (online)

Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, "Geografi Indonesia" http://indonesia.go.id/?page_id=479&lang=id (online), INDONESIA.GO.ID

Kumparan, <https://kumparan.com/@kumparannews/kronologi-penutupan-gunung-botak-2015-2017> (online)

Pan Mohamad Faiz, "Penafsiran Konsep Penguasaan Negara Berdasarkan Pasal 33 UUD 1945 dan Putusan Mahkamah Konstitusi", <http://dosen.narotama.ac.id/wp-content/uploads/2011/04/PENAFSIRAN-KONSEP PENGUASAAN-NEGARA.pdf>, (online) WebBlog Dosen Universitas Narotama Surabaya, (11 April 2018)

Sumber Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana